

Singkatan Laporan Penelitian Sosiolinguistik 1976 / 1977

2

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

TIDAK DIFERDAGANGKAN UNTUK CIHWA

**Singkatan Laporan Penelitian
Sosiolinguistik 1976/1977**

H A D I A H
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Singkatan Laporan Penelitian Sosiolinguistik 1976 / 1977

Oleh :

S. Effendi

Dendi Sugono

Farid Hadi

Zulkarnain



PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
1981

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	
No: Klasifikasi 306.4410 72 SIN S	No Indek 1432 Tgl. : 17-12-82 Ttd. : _____

Redaksi
S. Effendi

Seri Bb: 42

Naskah buku ini semula merupakan hasil Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Pusat, 1976/1977, diedit dan diterbitkan dengan dana Proyek Penelitian Pusat.

Staf Inti Proyek Pusat : S. Effendi (Pemimpin), Zulkarnain (Bendaharawan), Farid Hadi (Sekretaris), Lukman Ali, Yayah B. Lumintintang, Basuki Suhardi, Koentamadi, Sri Sukesi Adiwimarta, Dendy Sugono (Para Asisten), Dr. Amran Halim, dan Dr. Muljanto Sumardi (Konsultan).

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Alamat penerbit : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jalan Diponegoro 82, Jakarta Pusat.

PRAKATA

Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (1974/1975 --- 1978/1979) telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini, masalah kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, termasuk sastranya tercapai, yakni berkembangnya kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik di kalangan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan akhir ini, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah, penyusunan berbagai kamus istilah, dan penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa, dan pedoman pembentukan istilah, (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui berbagai media massa, (3) penerjemahan karya sastra daerah yang utama, sastra dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, (4) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian, inventarisasi, perekaman, pendokumentasian, dan pembinaan jaringan informasi, dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian beasiswa dan hadiah penghargaan.

sayembara mengarang, serta pemberian beasiswa dan hadiah penghargaan.

Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan tersebut, dibentuklah oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974 dengan tugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, mengingat luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu digarap dan luasnya daerah penelitian yang perlu

dijangkau, mulai tahun 1976 proyek ini ditunjang oleh 10 proyek yang berlokasi di 10 propinsi, yaitu (1) Daerah Istimewa Aceh yang dikelola oleh Universitas Syiah Kuala, (2) Sumatera Barat yang dikelola oleh IKIP Padang, (3) Sumatra Selatan yang dikelola oleh Universitas Sriwijaya, (4) Kalimantan Selatan yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat, (5) Sulawesi Selatan yang dikelola oleh IKIP dan Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang, (6) Sulawesi Utara yang dikelola oleh Universitas Sam Ratulangi, (7) Bali yang dikelola oleh Universitas Udayana, (8) Jawa Barat yang dikelola oleh IKIP Bandung, (9) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta, dan (10) Jawa Timur yang dikelola oleh IKIP Malang. Program kegiatan kesepuluh proyek di daerah ini merupakan bagian dari program kegiatan Proyek Penelitian Pusat di Jakarta yang disusun berdasarkan rencana induk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pelaksanaan program proyek-proyek daerah dilakukan terutama oleh tenaga-tenaga perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan berdasarkan pengarahan dan koordinasi dari Proyek Penelitian Pusat.

Setelah lima tahun berjalan, Proyek Penelitian Pusat menghasilkan lebih dari 250 naskah laporan penelitian tentang bahasa dan sastra dan lebih dari 30 naskah kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan setelah tiga tahun bekerja, kesepuluh proyek di daerah menghasilkan 135 naskah laporan penelitian tentang sebagai aspek bahasa dan sastra daerah. Ratusan naskah ini tentulah tidak akan bermanfaat apabila hanya disimpan di gudang, tidak diterbitkan dan disebarakan di kalangan masyarakat luas.

Buku *Singkatan Laporan Penelitian Sosiolinguistik 1976/1977* ini semula merupakan naskah laporan penelitian yang disusun oleh tim peneliti dari Pusat Bahasa dalam rangka kerja sama dengan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Pusat 1976/1977. Sesudah ditelaah dan di-edit seperlunya di Jakarta, naskah tersebut diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan dana Proyek Penelitian Pusat dalam usaha penyebarluasan hasil penelitian di kalangan penelitian bahasa, peminat bahasa, dan masyarakat pada umumnya.

Akhirnya, kepada Drs. S. Effendi dan semua pihak yang memungkinkan terlaksananya penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia.

Jakarta, Desember 1979

Prof. Dr. Amran Halim
Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa

DAFTAR ISI

	Halaman
Prakata	v
Daftar isi	viii
1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh di Aceh	1
2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Aceh	15
3. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar pada Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Aceh.	23
4. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Minangkabau di Sumatra Barat	31
5. Sastra Lisan Minangkabau: Tradisi Pasambahan Helat Per - kawinan	37
6. Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas I Sekolah Dasar di Sumatra Barat.	43
7. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah di Sumatra Barat.	45
8. Undak-usuk Bahasa Sunda	51
9. Undak-usuk Bahasa Jawa	59
10. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar Jawa Tengah (Surakarta)	69
11. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur . . .	79
12. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar Jawa Timur/Madura	91
13. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Madura di Madura	101
14. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Masyarakat di Sulawesi Selatan	111

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA ACEH DI ACEH

Oleh :

Budiman Sulaiman

Abdullah Faridan

Syarifah Hanum

Razali Cut Lani

1. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA ACEH DI ACEH

1.1 Pengantar

Menyadari betapa pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai warisan kebudayaan nasional yang perlu dipelihara, maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah ke arah pembinaan, pengembangan, dan pemeliharaan bahasa-bahasa daerah, di antaranya melalui penelitian.

Penelitian yang kami lakukan melalui Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Daerah Istimewa Aceh, mengenai Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh di Aceh, adalah merupakan salah satu pelaksanaan program Pemerintah terhadap pengembangan bahasa daerah. Penelitian ini mendapat biaya dari proyek tersebut.

Penelitian terbatas ini dapat dianggap sebagai penelitian pendahuluan terhadap penelitian yang menyeluruh, sehingga masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut terhadap aspek-aspek yang lain. Dengan demikian akan diperoleh data yang lebih lengkap dan luas tentang bahasa Aceh, sehingga dapat menunjang program pengembangan bahasa tersebut demi pembangunan nasional.

Masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, yang tersebar di daerah-daerah dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam tiap daerah terdapat bahasa daerah yang digunakan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat daerah itu sendiri.

Pemerintah telah menyatakan sikap yang tegas terhadap bahasa-bahasa daerah. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Bab IV, Pasal 36, dinyatakan bahwa bahasa-bahasa daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan yang masih hidup dan dibina oleh masyarakat pemakainya dihargai dan dipelihara oleh Negara. Bahasa-bahasa daerah itu

2.

adalah bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Bahasa Aceh adalah salah satu bahasa daerah yang masih hidup, yang dipakai oleh masyarakat Aceh sebagai penjelmaan kebudayaan Aceh. Kehidupan dan cara berpikir masyarakatnya pun dapat tercermin melalui bahasanya.

Kedudukan bahasa Aceh dalam masyarakat Aceh adalah sebagai bahasa pertama, bahasa ibu, yang menjadi alat untuk melahirkan pikiran dan perasaan, bahasa yang merupakan sumber persatuan untuk lingkungan keluarga di daerah ini.

Bahasa Aceh berfungsi sebagai alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat Aceh, lambang identitas dan kebanggaan daerah. Selain dari itu berfungsi juga sebagai pendukung bahasa nasional dan alat pendukung serta pengembang kebudayaan daerah, sehingga kelangsungan hidup dan pembinaannya perlu mendapat perhatian secukupnya.

Dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat Aceh dalam berkomunikasi dengan orang sederaahnya lebih senang menggunakan bahasa daerahnya daripada menggunakan bahasa Indonesia. Berkomunikasi dengan bahasa daerah adalah lebih menjelmakan rasa kekeluargaan, keakraban, dan rasa persatuan di antara mereka.

Peranan bahasa Aceh yang diteliti dalam masyarakat Aceh, antara lain ialah peranan dalam: keluarga, pemerintahan, pergaulan sehari-hari, keagamaan, peradatan, pendidikan dan pengajaran, perdagangan, dan kebudayaan. Bidang lain yang menjadi tujuan penelitian ialah tentang situasi pemakaian dan sikap pemakai, yakni kesadaran pemakai terhadap bahasa yang dipakainya dan bagaimana sikap pemakai terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa yang dipakainya itu.

Guna memperoleh data yang dianggap memadai, penelitian ini mengambil populasi semua orang yang menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pertama yang berdiam di seluruh Daerah Istimewa Aceh dalam kabupaten-kabupaten serta kota-kota madya, yakni Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kotamadya Banda Aceh, dan Kotamadya Sabang.

Oleh karena daerah penelitian terlalu luas maka sampel penelitian ditentukan pada tiga wilayah kecamatan dalam setiap kabupaten. Salah satu di antara tiga kecamatan itu dipilih yang letaknya dekat, sedangkan dua kecamatan lainnya jauh dengan ibu kota kabupaten. Peneliti mendatangi desa-desa atau kampung-kampung yang terpilih menjadi sampel di tiap-tiap kabupaten tersebut di atas.

1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini ditempuh dalam beberapa tahap pelaksanaan. Setiap tahap pelaksanaan itu senantiasa dilakukan sesuai dengan Rancangan Penelitian Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh di Aceh, yang telah disusun terlebih dahulu. Penyusunan rancangan penelitian itu sendiri berpedoman kepada pegangan kerja yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Daerah Istimewa Aceh. Oleh karena itu, penyusunan rancangan penelitian itu merupakan langkah *pertama* dalam kegiatan pelaksanaan penelitian ini.

Tahap kedua ialah penyusunan daftar angket. Penyusunan daftar angket ini didasarkan kepada tujuan dan hasil yang akan diharapkan, antara lain hendak memperoleh data yang lengkap atau gambaran yang jelas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Aceh serta gambaran tentang peranan bahasa Aceh dalam masyarakat Aceh.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan itu maka yang menjadi populasi atau sasaran penelitian ialah masyarakat yang khusus berbahasa ibu bahasa Aceh. Sedangkan bagi lingkungan masyarakat lainnya tidak dijadikan sasaran penelitian ini. Jelasnya, angket ini ditujukan kepada orang, baik sebagai pembicara maupun sebagai lawan bicara, yang menggunakan bahasa Aceh untuk berkomunikasi dalam kehidupan dan penghidupan mereka sehari-hari. Situasi pemakaian dan intensitas penggunaan bahasa Aceh merupakan data yang akan berbicara terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Aceh dalam masyarakat pemakainya di Aceh.

Golongan atau kelompok masyarakat yang dijadikan sampel dipilih dari anggota masyarakat yang berdiam dalam wilayah, mulai dari tingkat: kecamatan, kemukiman, desa, dan kampung, di kabupaten-kabupaten, tempat penelitian ini dilakukan. Golongan-golongan masyarakat yang dijadikan sampel pada tingkat itu antara lain terdiri dari: pejabat, pegawai negeri, pendidik atau pengajar, tokoh masyarakat (kepala mukim, imam mesjid, imam menasah, keuchik, dan cerdik pandai), masyarakat umum (orang biasa baik petani, nelayan, atau pembaca hikayat), dan siswa sekolah umum dan agama serta pelajar pada pendidikan pasantren. Untuk golongan pelajar hanya SLP dan SLA, bagian pendidikan umum dan pendidikan agama saja yang dipilih. Apabila pada salah satu tingkat pendidikan itu tidak terdapat dalam suatu kecamatan yang ditunjukkan, maka akan diusahakan ke kecamatan lain. Akan tetapi, bila juga tidak ada, usaha terakhir dipilih pada tingkat kabupaten.

Demikian kegiatan yang berlangsung dalam tahap ini. Sebagai instru-

men pengumpulan data telah disusun enam jenis angket. Setiap jenis angket yang disusun itu, butir-butir yang terkandung di dalamnya, selain memang khusus untuk bidangnya sendiri, juga terdapat butir yang bersamaan dengan butir dalam jenis angket lainnya. Butir yang bersamaan bunyinya itu dianggap sering dialami dalam kehidupan bermasyarakat. Kecuali dalam daftar angket untuk pelajar pada pendidikan pesantren, butir yang bersamaan itu tidak dicantumkan.

Penyusunan daftar angket seperti di atas dimaksudkan dan diharapkan agar peranan bahasa Aceh dalam lingkungan: *keluarga, pemerintahan, pergaulan sehari-hari, keagamaan, peradatan, pendidikan, perdagangan, dan kebudayaan*, dapat diperoleh data yang diduga akan lebih lengkap guna penilaian terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Aceh sebagai bahasa penghubung dalam masyarakat berbahasa ibu bahasa Aceh.

Tahap ketiga. Setelah daftar angket itu disusun dan diperbanyak sejumlah yang diperlukan, maka kegiatan selanjutnya dalam tahap ini ialah mengurus surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan survei ke daerah-daerah. Surat-surat itu berupa surat "Perintah Jalan" yang diperoleh dari Pemimpin Proyek, surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh yang ditujukan kepada para bupati/wali kotamadya kepala daerah tingkat II dalam Daerah Istimewa Aceh, yang memintakan agar kepada Tim Penelitian ini diberikan fasilitas dalam surveinya. Selain itu, juga surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kotamadya/Kecamatan/Kepala SLP dan SLA di lingkungan Kantor Wilayah P dan K dalam Daerah Istimewa Aceh yang memintakan agar kepada tim ini diberikan fasilitas dalam melaksanakan surveinya.

Pengurusan surat-surat itu bertujuan agar tenaga pelaksana tidak mendapat halangan atau rintangan dalam melaksanakan tugasnya di daerah-daerah sampel yang ditujunya. Untuk sampai ke wilayah kecamatan, surat dari gubernur itu harus dibuat surat lagi oleh bupati kepada para camat dalam wilayahnya. Kemudian berdasarkan surat itu pula, oleh camat kepala wilayah kecamatan dibuat surat yang ditujukan kepada para pamong desa dalam wilayahnya, memintakan agar kepada Tim ini hendaknya diberikan fasilitas dalam survainya ke desa-desa atau kampung-kampung yang didatanginya. Surat-surat ini akan diurus sendiri oleh petugas pada tiap kabupaten dan kecamatan yang dijadikan sampel penelitian yang akan didatanginya.

Kegiatan lain dalam tahap ini ialah penyusunan tenaga pelaksana pe-

nelitian atau surve yang akan dikirim ke daerah-daerah. Perhubungan dalam Daerah Istimewa Aceh terbagi dalam dua jalur lalu lintas yang terkenal dengan jalur lintas bagian timur dan jalur lintas bagian barat. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ke daerah-daerah dibagi pula dalam dua fase. Fase pertama ditempuh atau dituju ke daerah-daerah yang terdapat dalam jalur lintas Timur, yakni: Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar. Untuk masing-masing kabupaten itu ditugaskan seorang tenaga pelaksana. Fase berikutnya akan ditempuh ke daerah-daerah yang terdapat dalam jalur lintas barat, yakni: Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat. Dalam fase ini, survei ke Kotamadya Sabang serta Kotamadya Banda Aceh juga dilakukan. Untuk tiap kabupaten tersebut di atas. Susunan petugas pelaksana surve adalah sebagai berikut:

1. *Drs. Budiman Sulaiman*, penanggung jawab Penelitian, ditugaskan ke daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Barat;
2. *Drs. Abdullah Faridan*, sekretaris, ditugaskan ke daerah Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Selatan;
3. *Dra. Syarifah Hanum*, anggota, ditugaskan ke daerah Kabupaten Pidie dan Kotamadya Aceh Besar;
4. *Razali Cut Lani, BA*, anggota, ditugaskan ke daerah Kabupaten Aceh dan Kotamadya Sabang.

Daerah-daerah yang didatangi petugas, untuk tiap kabupaten dan kotamadya tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. *Aceh Besar*, sampel penelitian di wilayah Kecamatan: Ingin Jaya, Suka Makmur, dan Indrapuri.
2. *Pidie*, sampel penelitian di wilayah Kecamatan: Delima, Mutiara, dan Geulumpang Tiga.
3. *Aceh Utara*, sampel penelitian di wilayah Kecamatan: Muara Dua, Peudada, dan Jeunieb.
4. *Aceh Timur*, sampel penelitian di Kecamatan: Langsa, Peureulak, dan Idi Rayeuk.
5. *Aceh Barat*, sampel penelitian di wilayah Kecamatan: Sama Tiga, Kaway XVI, dan Kuala.
6. *Aceh Selatan*, sampel penelitian di Kecamatan: Meukek, Manggeng, dan Blang Pidie.
7. *Kotamadya Banda Aceh*, sampel penelitian di Kecamatan Baiturrahman.
8. *Kotamadya Sabang*, sampel penelitian di Kecamatan Sabang.

Kecamatan yang tersebut pertama letaknya dekat dengan ibu kota kabupaten, sedangkan yang tersebut pada urutan kedua dan ketiga, letaknya jauh dari ibu kota kabupaten.

Tahap keempat. Setelah persiapan dilengkapi, termasuk instrumen pengumpulan data, berangkatlah anggota tim ini dari Banda Aceh ke daerah tujuannya masing-masing.

Perjalanan melalui jalur lintas timur dapat ditempuh dengan mudah tanpa rintangan yang berarti. Hal ini disebabkan trayek hubungan darat, baik untuk trayek jarak jauh maupun trayek jarak menengah dan bahkan untuk trayek lokal pun, sangat ramai dilalui kendaraan. Hubungan lalu lintas antarkabupaten dan antar kecamatan sangat lancar sehingga perjalanan ke wilayah kecamatan yang dituju sedikit pun tidak mengalami kesulitan.

Dalam menghubungi responden, terutama yang berdiam di pedalaman, di kampung-kampung atau desa-desa misalnya dengan kepala kemukiman, keuchik, tngk. imum mukim, tngk. di bale atau tngk. di rangkang, karena kesibukan dalam penghidupan mereka, maka agak sukar mereka ditemui di tempatnya. Memang saat pelaksanaan penelitian ini dilakukan, masyarakat Aceh pada umumnya sedang menghadapi kesibukan di persawahan. Oleh karena itu, untuk menemui mereka tidaklah selesai dalam satu dua hari saja. Bahkan untuk bertemu dengan para pejabat pun kadang-kadang memerlukan waktu yang agak lama. Lebih-lebih kalau kita datang lebih siang ke kantornya, kecil harapan untuk dapat menjumpainya, terutama Camat, karena telah turun ke "lapangan" atau kesibukan lain dalam tugasnya di luar lingkungan kantornya. Dalam hal seperti ini, petugas menyusulnya ke "lapangan" dan akhirnya perjumpaan itu berlangsung jauh di pedalaman misalnya, di tempat pembangunan irigasi. Demikian pula untuk beberapa pejabat lainnya, oleh karena kesibukan mereka, kita tidak dapat menemuinya di kantornya.

Target responden untuk masing-masing jenis angket, terutama untuk pejabat, ternyata tidak dapat tercapai atau terpenuhi seluruhnya. Di samping itu, terdapat pula dalam suatu wilayah kecamatan, responden yang ditargetkan terpenuhi, tetapi tidak semua angket yang ditujukan kepada mereka dapat diedarkan karena mereka bukan pejabat atau pegawai yang berbahasa ibu bahasa Aceh. Oleh karena itu, jumlah responden yang ditargetkan semula untuk tiap kecamatan menjadi berkurang, tetapi pada wilayah kecamatan lain menjadi berlebih dari yang ditargetkan. Oleh sebab itu, jumlah responden pada setiap daerah sampel penelitian tidak sama banyaknya. Hal ini memang telah diusahakan agar sedapat mungkin target yang telah ditetapkan

kan itu dapat terpenuhi. Namun demikian, pelaksanaan survei dalam wilayah jalur lintas timur berjalan sebagaimana yang diharapkan. Semua anggota tim kembali ke pangkalan Banda Aceh dengan membawa daftar angket yang dioperasikan kepada sasarannya.

Setelah kembali dari jalur survei bagian timur, petugas langsung bergerak ke jalur survei bagian barat, yaitu ke daerah Kabupaten Aceh Barat dan daerah Kabupaten Aceh Selatan. Demikian pula ke Kotamadya Sabang dan Kotamadya Banda Aceh.

Perjalanan menuju daerah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan memerlukan waktu empat hari empat malam pada jarak yang relatif sama dengan jarak yang ditempuh dalam jalur timur. Bus yang ditumpangi sering terbenam dalam kubang yang terdapat hampir sepanjang perjalanan. Dengan susah payah bus bangun lagi setelah berjam-jam lamanya merayap dalam lumpur. Kadang-kadang tersangkut di tengah persawahan, tetapi kadang-kadang kami harus menginap di tengah hutan belantara. Dalam situasi alam dengan curahan hujan hampir sepanjang hari itu, kami mendoakan semoga yang berwajib hendaknya memperhatikan juga pembangunan dalam wilayah ini. Lebih-lebih lagi hampir pada setiap sungai yang dilintasi, bus harus naik rakit yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapat gilirannya pula. Namun demikian, kami belum sampai juga di tempat tujuan. Dalam penyebaran angket kepada sasarannya petugas mengalami hal yang sama seperti yang dialami di jalur timur. Masyarakat di sini juga sedang sangat sibuk di persawahan. Demikian pula hal-hal lainnya sama saja keadaannya dengan di jalur timur.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ke desa-desa adalah masalah waktu. Meskipun masyarakat akan menerima peneliti dengan ramah tamah, mereka kurang mempunyai waktu untuk melayaninya karena kesibukan.

Tahap kelima. Setelah angket yang diedarkan itu terkumpul semuanya, dalam tahap ini kegiatannya mentabulasikan data. Hasil pentabulasian setiap butir itu, sesuai dengan klasifikasinya dan peranan penggunaannya dalam masyarakat berbahasa ibu bahasa **Aceh** akan memperlihatkan data prosentase penggunaannya mulai tingkat kecamatan ke kabupaten dan dari tingkat daerah kabupaten ke tingkat wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian terhadap prosentase penggunaan bahasa Aceh dan penggunaan nonbahasa Aceh dari setiap jenis butir itu dibuatlah analisis dan kemudian penafsiran sampai kepada kesimpulannya.

Langkah selanjutnya penyusunan kerangka laporan. Berdasarkan ke-

rangka laporan itu, maka disusunlah naskah laporan yang kemudian diperbanyak untuk disampaikan kepada Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Daerah Istimewa Aceh.

1.3 Resume Hasil Penelitian

Seperti diketahui bukan semua penduduk daerah Aceh menggunakan bahasa Aceh, melainkan ada bahasa-bahasa daerah yang lain terpakai sebagai bahasa pergaulan dalam masyarakat tertentu. Penduduk yang berdiam di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara tidak turut menjadi subjek penelitian ini karena penduduknya bukan pemakai bahasa Aceh.

Meskipun demikian, jumlah pemakai bahasa Aceh diperkirakan 1.775.702 orang dari jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berjumlah 2.280.802 orang (tidak termasuk warga negara asing), sedangkan jumlah penduduk pemakai nonbahasa Aceh diperkirakan sebanyak 505.101 orang.

Di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Selatan ada beberapa kecamatan yang penduduknya terdiri dari suku bangsa yang beragam. Kecamatan-kecamatan yang penduduknya mayoritas pemakai bahasa Aceh ditarik menjadi populasi penelitian ini.

Umumnya bahasa Aceh digunakan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bahasa inilah yang menjadi bahasa pertama dan utama dalam pergaulan. Bahasa Indonesia bagi mereka juga dikenal dan pernah dipakai bahasa kedua dalam pergaulan masyarakat. Hanya dalam keadaan yang formal sekali barulah bahasa Indonesia digunakan. Bahasa Aceh dipandang sebagai bahasa yang paling mantap dan tepat untuk berbicara dengan para anggota keluarga atau dengan anggota-anggota masyarakat yang sama-sama berbahasa ibu bahasa Aceh.

Dalam keluarga yang masih seragam (belum ada anggota keluarga yang berasal dari pemakai bahasa lain) semua masalah dibicarakan dalam bahasa Aceh. Akan tetapi, dalam keluarga yang beragam sering juga terjadi kedwibahasaan meskipun prosentase bahasa Aceh masih jauh lebih besar dari yang lainnya. Lain halnya pada keluarga yang masih muda, yang menggunakan bahasa Indonesia dengan anak-anaknya. Mereka umumnya tinggal di kota. Hanya dengan anak-anaknya saja mereka berbahasa Indonesia, sebaliknya, jika berhadapan dengan anggota keluarga yang lain, kembali mereka menggunakan bahasa Aceh.

Jika berada dalam suatu kelompok yang masih agak asing bagi seseorang, ia akan menggunakan bahasa Aceh dengan lawan bicara yang diketahuinya orang Aceh untuk menunjukkan identitas dirinya. Dalam keadaan demikian, orang mudah sekali merasa tersinggung bila mendengar orang lain itu memakai bahasa Aceh yang kurang baik. Tetapi akan senang menerima orang itu yang berusaha memakai bahasa Aceh dengan baik. Jadi, mereka merasa senang kalau bahasa Aceh dipelihara, dibina dengan baik, dan dipakai sebagaimana mestinya.

Selain sebagai bahasa pergaulan, bahasa Aceh juga berfungsi dalam pengelolaan kesenian. Banyak bentuk kesenian Aceh yang dilahirkan dalam bahasa Aceh. Tarian daerah memang memiliki sifat yang menunjukkan sifat kedaerahan suatu masyarakat. Jika tarian itu dibentuk dengan unsur-unsur lain, maka akan lain kesan yang ditimbulkannya. Karena itu, sebaiknya tarian suatu daerah diiringi oleh nyanyian daerah pula. Kalau ingin memelihara kesenian daerah, sewajarnya kita berkewajiban memelihara bahasanya sehingga eksistensi kesenian daerah tercermin dari bahasa yang dipakai sebagai pengiring kesenian itu sendiri. Kebudayaan daerah umumnya dan bahasa daerah khususnya merupakan akar untuk pertumbuhan kebudayaan Indonesia dan bahasa Indonesia.

Pergaulan antara orang-orang Aceh umumnya menggunakan bahasa Aceh. Seorang akan menyapa atau menegur kawannya yang berjumpa di jalan, dalam bahasa Aceh. Tidak ada perbedaan tingkat umur dalam hal pemakaian bahasa ini. Antara orang tua dengan anak-anak, anak-anak sesama atau pun anak-anak yang berbicara dengan orang tuanya selalu menggunakan bahasa Aceh. Akan janggal sekali rasanya jika seorang anak berbicara dengan orang tuanya (yang biasa berbahasa Aceh) berbicara dalam bahasa lain. Tentu saja tidak merupakan permasalahan dalam keluarga muda seperti yang disebut di atas.

Percakapan antara pejabat dengan pegawainya pun dilakukan dengan bahasa Aceh. Demikian pula antara pegawai dengan atasannya dan sesama pegawai. Pergaulan antara orang-orang yang berlainan tempat asal dengan bahasa ibu yang sama, dengan tidak memperhatikan pangkat atau jabatan masing-masing, akan terjadi komunikasi dalam bahasa Aceh. Baik antara para pejabat ataupun dalam pergaulan mereka dengan orang lain, anggota masyarakat, bahasa Aceh menjadi bahasa percakapan. Lain halnya jika antara mereka belum saling mengenal, atau terasa bahwa seseorang masih asing bagi yang lainnya. Biasanya pembicaraan dimulai dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan antarsuku bangsa di Indonesia,

tetapi jika selanjutnya ternyata bahwa mereka sama-sama berasal dari satu bahasa daerah, percakapan akan segera beralih ke dalam bahasa daerah (Aceh). Orang Aceh merasa lebih akrab persahabatannya jika antara sesama mereka berbicara dalam bahasa Aceh. Antara dua orang yang baru berkenalan, penggunaan bahasa Aceh merupakan pertanda bahwa mereka telah saling bersahabat dengan intim. Sebaliknya, orang akan merasa masih dianggap asing oleh kawannya kalau ia masih berbicara dalam bahasa lain, dalam situasi yang informal. Dalam percakapan yang formal, lebih-lebih antara orang yang belum berkenalan baik, bahasa Indonesia tentulah lebih tepat dipakai sebagai bahasa percakapan. Namun, tidak jarang dijumpai, dalam kedinasan pun, para pejabat menggunakan bahasa Aceh dalam inspeksi dinasnya ke kecamatan-kecamatan, terutama bila peserta dalam pembicaraan berbahasa itu seragam.

Pergaulan dalam masyarakat desa dapat dikatakan semuanya menggunakan bahasa Aceh. Pembicaraan dalam bidang pendidikan (informal), politik, dan sosial lainnya, menyampaikan amanat, memberi nasihat/petunjuk, akan lebih mantap bila disampaikan dalam bahasa itu karena lebih mudah dipahami orang.

Para pemimpin masyarakat di desa juga menggunakan bahasa Aceh untuk bermusyawarah, membicarakan/memecahkan sesuatu masalah dengan para warga masyarakatnya. Bahasa pengantar dalam pengajian, pendidikan/pengajaran ilmu agama yang dilangsungkan di rumah-rumah, umumnya dijalankan dalam bahasa Aceh. Demikian pula di pesantren-pesantren, menasah-menasah, atau pun di mesjid-mesjid.

Bahasa Aceh dipergunakan oleh masyarakat desa dalam segala kegiatan mengatur kelangsungan hidupnya.

Bahasa pengantar dalam alam pendidikan yang formal, seperti di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah, memang umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Namun dalam beberapa hal, para guru sering terpaksa menggunakan bahasa Aceh untuk memberikan penjelasan yang lebih mantap kepada muridnya.

Dalam kalangan pelajar, sesamanya di sekolah, pada umumnya bahasa Acehlah yang digunakan. Bahasa pergaulan mereka pada umumnya bahasa Aceh yang mereka pergunakan dalam pekarangan sekolah sewaktu berbicara dengan para guru wali kelas ataupun dengan kepala sekolah mereka. Menghadapi para pelatih/guru olah raga mereka bahasa Aceh juga sering dipakai di samping bahasa Indonesia.

Selanjutnya, jika di lapangan olah raga di luar waktu sekolah, mereka lebih senang berbahasa Aceh. Dalam situasi belajar di kelas mereka berbicara

bahasa Indonesia dengan guru mereka, tetapi di luar ruangan mereka berbahasa Aceh. Demikian pula sewaktu mereka menerima tamu. Jika menghadapi tamu yang berbahasa ibu bahasa Aceh, mereka akan menyapanya dalam bahasa Aceh. Tetapi dengan tamu yang bukan berbahasa Aceh, mereka akan berbahasa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa para pelajar pada umumnya berbahasa Aceh dengan sesama orang Aceh kecuali dalam keadaan tertentu (formal). Mereka berbahasa Indonesia jika berhadapan dengan orang yang bukan berbahasa ibu bahasa Aceh atau pun dengan orang (tamu) yang belum mereka kenal.

Dalam belajar bersama (*study group*) mereka lebih sering menggunakan bahasa Aceh sesamanya meskipun di antara mereka ada pelajar yang berbahasa ibu bahasa lain. Pada umumnya pelajar yang berasal dari daerah lain berusaha mempelajari bahasa Aceh guna menyesuaikan diri dalam pergaulan umum di masyarakat.

Pelayanan kesehatan masyarakat oleh para petugas kesehatan di Puskesmas mendorong mereka menggunakan bahasa Aceh dalam konsultasi para pasien mereka. Orang lebih mudah mengemukakan keadaan penyakitnya kepada perawat atau dokter dalam bahasa Aceh. Lebih-lebih di luar ibu kota kabupaten yang penduduknya dapat dikatakan seratus persen berbahasa Aceh. Kalaupun orang menguasai bahasa Indonesia, biasanya sangat kurang digunakan untuk keperluan itu.

Pada dokter yang berasal dari daerah ini, biasanya lebih sukses ditengah-tengah penduduk desa karena mereka dapat berbahasa yang dapat dipahami bersama. Tidak terjadi kekakuan dalam pergaulan mereka sebagai akibat tidak lancarnya komunikasi lisan. Seringkali pula penduduk kurang simpati kepada para dokter yang enggan memakai bahasa Aceh (kurang memahami bahasa itu bukan orang daerah Aceh. Hal tersebut mengakibatkan pasien lebih senang berurusan dengan para dukun, lebih-lebih jika dukun itu juga mengenal pengobatan secara medis.

Para dukun pada umumnya berbahasa Aceh dengan pasiennya dan mampu menghibur pasien dengan bermacam harapan yang mudah dipahami. Di samping itu ia memberikan obat yang dapat meringankan penderitaan pasien.

Penggunaan bahasa Aceh oleh para dokter juga turut menentukan peranannya dalam berhasilnya usaha dan bantuan pemerintah dalam bidang pemerataan kesehatan rakyat. Para dokter yang berbahasa ibu bahasa Aceh semuanya menggunakan bahasa Aceh dengan pasiennya. Para dokter yang bukan berbahasa Aceh pun didorong oleh pasiennya untuk berbahasa Aceh. Demikian juga semua aparat kesehatan lainnya di Puskesmas.

Dalam kegiatan pemerintahan, kiranya peranan bahasa Aceh tak dapat

disangkal lagi. Baik antara pejabat dengan pejabat, antara pejabat dengan bawahannya, antara pejabat dengan para tokoh masyarakat, maupun antara tokoh masyarakat dengan para pemimpin lainnya di kecamatan, semuanya berkomunikasi dalam bahasa Aceh.

Rapat-rapat yang diadakan di kantor kecamatan yang dihadiri oleh kepala-kepala desa dan cendekiawan dalam kecamatan, bahasa daerah (Aceh) dipakai secara intensif. Hal ini bukan berarti bahwa bahasa Indonesia tidak terdapat di dalamnya, tetapi bahasa Acehlah yang terbanyak digunakan. Jika rapat diadakan di desa (balai desa), meskipun para pejabat kecamatan turut hadir, komunikasi tetap berlangsung dalam bahasa Aceh. Semua acara dan masalah dibicarakan dalam bahasa tersebut. Pidato atau ceramah yang diselenggarakan di desa selalu menggunakan bahasa Aceh.

Penggunaan bahasa Aceh dalam ceramah-ceramah keagamaan, khotbah Jum'at, khotbah nikah di desa, selalu disampaikan dalam bahasa Aceh. Di desa-desa yang penduduknya beragam, pernah juga khotbah dan sebagainya itu diucapkan dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak kurang dari enam puluh prosen bahan itu akan diucapkan dalam bahasa Aceh. Hal ini memungkinkan, karena di daerah yang penduduknya beragam demikian, penduduk yang menggunakan bahasa ibu bahasa lain, umumnya juga memahami bahasa Aceh. Hanya di desa-desa yang penduduknya mayoritas bukan berbahasa ibu bahasa Aceh, ceramah dan lain-lainnya itu disampaikan dalam bahasa Indonesia. Seperti telah disebutkan di atas, desa demikian tidak menjadi obyek penelitian ini. Ceramah atau pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Aceh akan lebih mantap dan berkesan bagi para pendengarnya. Memang pengajaran itu dapat juga disampaikan dalam bahasa Indonesia karena sebagian besar penduduk Aceh memahami bahasa Indonesia secara pasif. Namun diperkirakan akan sukar diterima atau dipahami dengan baik. Itulah sebabnya orang lebih cenderung menggunakan bahasa Aceh untuk keperluan seperti itu.

Pelaksanaan acara adat senantiasa dibahasakan dalam bahasa Aceh. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam peradatan selalu dilaksanakan oleh orang Aceh. Oleh karena itu, tentu tidak akan terpakai bahasa lain dalam lingkungan orang-orang Aceh. Ada kecenderungan pada orang-orang Aceh, di mana pun mereka berada akan selalu berbahasa daerah dengan kawan-kawan yang sama bahasa ibu mereka. Demikian pula halnya di daerah Aceh sendiri, mereka yang memakai bahasa Aceh yang lain (seperti bahasa Jamu ataupun bahasa Gayo). Mereka akan menggunakan bahasa ibunya jika berbicara dengan kawan yang sebahasa ibu, meskipun di antara mereka ada orang Aceh yang lain yang berbahasa ibu bahasa tersebut.

PETA BAHASA ACEH

Skala 1 : 1000.000



Dalam perdagangan atau jual beli, peranan bahasa Aceh makin lebih kentara dan intensif. Pedagang di desa, baik anak negeri maupun orang asing, semuanya berbahasa Aceh. Seperti di daerah yang lain juga, di Aceh pun dikenal adanya hari pekan, yakni hari tertentu dalam seminggu orang mengadakan hari pasar. Pedagang keliling berkumpul berjualan pada suatu tempat atau kedai. Pedagang keliling ini semuanya berbahasa Aceh dengan para pembeli, yang kadang-kadang datang dari kampung-kampung yang jauh di pedalaman. Orang yang datang itu memang masih awam sekali terhadap bahasa Indonesia. Hampir dapat dikatakan bahwa kita tidak mungkin berbahasa lain dengan mereka karena sama sekali tidak mereka pahami. Sebab itu, memahami bahasa Aceh merupakan syarat mutlak bagi para pedagang keliling.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DI ACEH

Oleh :

**Tim Peneliti Fakultas Keguruan
Universitas Syiah Kuala Darussalam dan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Istimewa Aceh**

2. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DI ACEH

1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan merupakan bahasa kesatuan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Karena kedudukannya yang begitu penting dalam kehidupan bangsa, maka Pemerintah ingin mengetahui sampai di mana bahasa Indonesia sudah berperan dalam kehidupan masyarakat dan dalam hal ini masyarakat Aceh. Sehubungan dengan keinginan itu, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan agar suatu penelitian tentang "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Aceh" dilaksanakan.

Hingga sekarang, suatu penelitian mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Aceh belum pernah diadakan. Oleh karena itu, data deskriptif tentang peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat Aceh belum ada. Di samping itu, dalam daerah Aceh terdapat beberapa bahasa daerah yang berlainan satu dengan yang lain dan masing-masing bahasa daerah memiliki pemakai yang terdiri dari kelompok etnis yang berbeda pula. Dengan demikian, suatu penelitian untuk menjajaki peranan bahasa Indonesia dalam masyarakat yang demikian memang sudah sepantasnya.

Melalui penelitian ini, ingin diketahui sampai sejauh mana bahasa Indonesia sudah berfungsi serta berperan dalam kehidupan masyarakat Aceh yang mempunyai beberapa bahasa daerah. Apakah bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai alat komunikasi utama di kalangan masyarakat yang demikian atau tidak.

2. Daerah penelitian ialah seluruh daerah tingkat II dalam daerah Propinsi Aceh. Dari tiap kabupaten dipilih tiga kecamatan, yaitu kecamatan kota, pinggir kota, dan kecamatan luar kota. Pemilihan kecamatan itu kecuali yang dalam kota, dipilih secara random. Kemudian dari setiap kecamatan yang terpilih dipilih lagi secara random tiga kampung atau desa.

Pengumpulan data penelitian ini, di seluruh daerah yang telah dipilih itu, dilaksanakan dengan penyebaran daftar pertanyaan atau angket serta observasi. Pengumpulan data melalui teknik tanya jawab tidak mungkin dilaksanakan mengingat waktu dan dana yang disediakan terbatas.

Kami menyadari bahwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket responden tertentu, terutama yang di luar kota mungkin terpengaruh oleh jawaban yang diberikan orang lain. Namun demikian, kami telah berusaha mengurangi kemungkinan menyalin jawaban orang lain sekecil mungkin, yaitu dengan memisah-misahkan responden sehingga tidak berkelompok.

3. Sampel penelitian ini kami ambil dari tiga kalangan populasi menurut pembagian daerah yang kami sebut terdahulu:

- (a) dari golongan atau kalangan masyarakat umum (petani/nelayan, buruh, pedagang dan swasta lainnya);
- (b) dari kalangan pejabat/pegawai Pemerintah;
- (c) dari kalangan pendidikan (pelajar dan pengajar).

Pemilihan sampel dilakukan secara random. Populasi dari kalangan pejabat/pegawai Pemerintah kami ambil dari lima jawatan atau kantor yaitu:

- (a) kantor bupati,
- (b) dinas kesehatan kabupaten
- (c) dinas P dan K kabupaten,
- (d) jawatan agama kabupaten.

Penentuan kantor-kantor tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa jawatan tersebut di atas secara relatif lebih sering dan banyak berhubungan dengan berbagai jenis anggota masyarakat. Sampel dari populasi ini juga dipilih secara random, kecuali kepada kantor atau dinas.

4. Dari hasil pengolahan dan analisis data ternyata bahwa kedudukan bahasa Indonesia di Aceh ialah sebagai bahasa kedua sesudah bahasa daerah. Kedudukan ini sudah dapat diduga dari semula karena masyarakat Aceh masih homogen bila ditinjau dari segi linguistik, yang dimaksud di sini ialah masing-masing kelompok etnis yang mempertahankan dan mempergunakan secara aktif bahasa daerah mereka.

Dengan kenyataan itu, maka bahasa Indonesia hanya dipergunakan bila perlu, yaitu jika komunikasi dengan menggunakan bahasa daerah tidak mungkin ataupun kurang lancar.

Di kalangan pejabat/pegawai, bahasa Indonesia hanya berfungsi sebagai alat komunikasi utama dalam rapat-rapat atau dalam urusan-urusan

dinas. Ini pun mungkin disebabkan adanya ketentuan yang menghendaki pemakaian bahasa Indonesia pada jawatan-jawatan Pemerintah. Di luar urusan atau rapat dinas fungsi dan peranan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sudah berkurang. Para pejabat atau pegawai kurang memakai bahasa Indonesia, kecuali bila terpaksa, baik karena tidak dapat berbahasa daerah ataupun karena lawan bicara tidak dapat berbahasa daerah.

Dengan demikian, jelas bahwa peranan bahasa Indonesia di jawatan-jawatan Pemerintah, di kalangan pejabat atau pegawai, belum dapat dikatakan menentukan sebab bahasa Indonesia hanya dipergunakan bila terpaksa untuk menggantikan bahasa daerah pada waktu-waktu tertentu, di kalangan atau dengan orang-orang tertentu dan dalam situasi tertentu pula.

Dalam melayani orang-orang yang berurusan ke jawatan-jawatan Pemerintah, penggunaan bahasa Indonesia dari orang dalam kalangan instansi Pemerintah ditentukan oleh jenis tamu yang datang berurusan dan juga jenis pejabat/pegawai yang melayani tamu. Jika salah seorang dari yang berkomunikasi ternyata berlainan suku dan tidak dapat berbahasa daerah, maka alat komunikasi itu ialah bahasa Indonesia. Tetapi apabila yang datang itu dan yang melayani terdiri dari orang-orang yang sama sukunya maka penggunaan bahasa Indonesia tidak menonjol, terutama sekali pada jawatan-jawatan Pemerintah di tingkat kecamatan.

5. Fungsi dan peranan bahasa Indonesia di bidang pendidikan, dalam hal ini di lingkungan sekolah, juga tidak jauh bedanya dari keadaan pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan jawatan Pemerintah. Di lingkungan sekolah pemakaian bahasa Indonesia yang menonjol sebagai alat komunikasi itu baru dalam proses mengajar-belajar. Ini mungkin karena bahasa pengantar yang harus dipergunakan dari kelas empat sekolah dasar ke atas ialah bahasa Indonesia. Dalam komunikasi di luar jam pelajaran, baik antara pelajar dengan pengajar maupun sesama pelajar dan sesama pengajar, pemakaian bahasa Indonesia lebih banyak tergantung dari situasi dan jenis pembicara serta pendengar yang terlibat dalam komunikasi. Pendeknya faktor keterpaksaan masih lebih menonjol daripada faktor keperluan. Baik pelajar maupun pengajar akan banyak menggunakan bahasa Indonesia bila berkomunikasi dengan lawan bicara yang berlainan suku.

Pemakaian bahasa Indonesia yang dapat dikatakan menonjol di kalangan pengajar tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan ialah dalam rapat dewan guru. Ini pun mungkin karena adanya ketentuan yang menghendaki pemakaian bahasa Indonesia dalam rapat-rapat dinas.

Pelajar dan pengajar adalah golongan yang diharapkan sebagai model bagi kalangan umum dalam hal penggunaan bahasa Indonesia rupanya belum begitu berfungsi di Aceh.

Memang dalam hal-hal tertentu pelajar juga banyak menggunakan bahasa Indonesia. Dalam mendiskusikan pelajaran dengan teman-teman, misalnya, mereka banyak menggunakan bahasa Indonesia. Ini dapat dipahami sebab beberapa ilmu tertentu sangat sukar mendiskusikannya dengan memakai bahasa daerah.

6. Di kalangan masyarakat umum pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga tergantung dari lokasi dan kebutuhan. Masyarakat kota lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia disebabkan oleh komposisi masyarakat yang terdiri dari anggota-anggota masyarakat yang berlainan etnis. Masyarakat kota di Aceh relatif lebih banyak percampuran dibandingkan dengan masyarakat pinggir kota dan luar kota.

Di kalangan masyarakat kota pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sosial mencapai prosentase di atas lima puluh prosen. Di bidang perdagangan atau jual beli, prosentase pemakaian bahasa Indonesia lebih besar lagi. Ini mungkin sebab dalam kegiatan jual beli lebih sering dan lebih banyak terlibat anggota-anggota masyarakat yang berbeda suku karena pada dasarnya di bidang ini, tidak seperti halnya dengan upacara adat atau upacara agama, hampir tidak ada orang yang tidak pernah terlibat. Namun demikian, tidak di semua tempat, di mana jual beli berlangsung, kadar pemakaian bahasa Indonesia sama. Di pinggir kota, lebih-lebih di luar kota, prosentase penggunaan bahasa Indonesia jauh lebih kecil, yaitu di bawah lima puluh prosen.

Fungsi bahasa Indonesia dalam aspek-aspek kehidupan sosial lain, seperti dalam upacara adat perkawinan dan upacara-upacara lain di kalangan masyarakat, juga tergantung dari tempat dan jenis anggota masyarakat yang hadir pada suatu upacara adat. Pada upacara adat yang dilangsungkan di kota, bahasa Indonesia lebih banyak dipergunakan sebab beragamnya anggota masyarakat yang hadir pada suatu upacara. Lebih ke pinggir atau luar kota, orang-orang yang hadir dalam suatu upacara, sudah relatif homogen dan dengan sendirinya bahasa Indonesia tidak lagi merupakan alat komunikasi utama. Bahasa Indonesia hanya disisipkan pada pemakaian bahasa daerah. Orang sudah lebih enggan memakai bahasa Indonesia di tengah-tengah khalayak yang berbahasa daerah. Perasaan enggan itu ada yang karena merasa kurang intim berbahasa Indonesia dengan orang-orang sesuku yang dapat berbahasa daerah, atau karena takut dicap berlagak sok.

Jelasnya fungsi dan peranan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat pinggir dan luar kota jauh lebih kecil. Mereka hanya mempergunakan bahasa Indonesia secara insidental. Waktu mereka berurusan ke jawatan Pemerintah, misalnya, mereka menggunakan bahasa Indonesia bila yang melayaninya bukan orang sesuku dan tidak dapat berbahasa daerah. Sekali apabila orang-orang dari jawatan Pemerintah datang ke tempat mereka dan yang datang itu tidak dapat berbahasa daerah, anggota masyarakat setempat terpaksa menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam kelompok tertentu, terutama para khatib atau juru dakwah, lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia karena penggunaan bahasa daerah dirasa kurang lancar dalam mengekspresikan maksud. Yang disebut terakhir sering terjadi di Aceh dalam menterjemahkan ayat-ayat al-Quran atau hadits. Biasanya khatib atau juru dakwah bila berhadapan dengan masyarakat luar kota, menterjemahkan ayat-ayat al-Quran atau hadis ke dalam bahasa Indonesia terlebih dulu baru kemudian diperjelas dengan mempergunakan bahasa daerah. Tetapi bila khatib berkhotbah atau juru dakwah berdakwah di kota, maka mereka hanya sedikit menggunakan bahasa daerah karena jamaah terdiri dari berbagai kelompok etnis di mana kehadiran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi lebih mendesak.

Sedikitnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat pinggir dan luar kota tidaklah berarti bahwa mereka tidak dapat berbahasa Indonesia. Mereka hanya melihat kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa daerah, komunikasi tidak terhambat.

7. Dari hasil pengolahan data ternyata bahwa sikap pemakai bahasa Indonesia di Aceh adalah positif. Kebanyakan responden dari semua kelompok menyatakan bahwa sepantasnyalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi meskipun di kalangan orang-orang yang berbahasa daerah.

Yang mengherankan ialah terdapatnya kontradiksi antara sikap positif dengan kenyataan tentang pemakaian bahasa Indonesia. Sikap positif dari kebanyakan responden tidak direalisasikan dalam praktek, sebab mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang dikehendaki. Apa yang menghambat kebanyakan responden untuk merealisasikan sikap positif mereka. Apakah ada faktor-faktor sosio-kultural atau faktor fisiokologis yang menghambat mereka dalam mewujudkan sikap positif mereka masih merupakan tanda tanya. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu diperlukan suatu penelitian tersendiri.

8. Dalam setiap usaha untuk mencari sesuatu yang berguna dalam kehidupan ini tidak jarang si pencari menemukan hambatan-hambatan. Cuma sifat dari hambatan-hambatan itu yang berbeda-beda. Ada hambatan kecil dan ada pula yang besar.

Dalam melaksanakan penelitian ini, kami mengalami juga beberapa hambatan, baik yang bersumber pada peneliti sendiri maupun yang bersumber di luar peneliti. Hambatan-hambatan yang bersumber dari peneliti ialah adanya beberapa tugas lain, di samping tugas penelitian, yang juga menyita banyak waktu dan energi dalam penyelesaiannya, sehingga pemikiran tidak dapat dipusatkan penuh pada penelitian. Tugas-tugas rangkap memang sukar untuk dielakkan di daerah tertentu, pada saat ini, mengingat tidak cukupnya tenaga yang tersedia bagi pendistribusian beberapa tugas tertentu. Hambatan-hambatan yang bersumber di luar peneliti juga kami alami dalam penelitian ini. Singkatnya waktu yang diberikan oleh pemberi tugas, misalnya. Dalam teori, waktu yang disediakan untuk menyelesaikan penelitian ialah satu tahun, tetapi dalam kenyataannya hanya enam bulan. Waktu yang demikian singkat itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian. Di daerah Aceh faktor waktu sangat penting sebab keadaan alamnya atau medan penelitian sangat berat sedangkan fasilitas-komunikasi untuk mengarungi medan yang berat masih jauh dari memadai. Hambatan-hambatan yang bersumber dari responden juga dapat menghambat pelaksanaan penelitian. Para responden di tempat-tempat tertentu masih sukar dapat diharapkan untuk memberikan jawaban yang relatif jujur. Mereka masih enggan dan bahkan ada yang takut kalau-kalau jawaban mereka akan menyusahkan diri mereka sendiri. Ini mungkin disebabkan oleh pengalaman pahit mereka semasa orde lama di mana banyak rakyat desa dijadikan objek bagi kepentingan jahat oleh golongan tertentu. Ada juga sebagian rakyat yang merasa bahwa mereka hanya dijadikan objek penelitian semata-mata, sedangkan hasil penelitian tidak pernah mereka kecap. Orang-orang yang belum mendapat pekerjaan, misalnya, berprasangka bahwa dengan adanya penelitian dengan sendirinya terpecahkan persoalan mereka. Hambatan-hambatan tersebut di atas kami kemukakan di sini agar jadi bahan pertimbangan bagi yang memberikan kontrak untuk suatu kegiatan penelitian.

**BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR PADA
SEKOLAH DASAR DI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Oleh:

A. Darwis A. Sulaiman

Nurdin Nafi

M. Nasir Basyir

Syamsuddin Z.A.

Kamaruddin

Emi Suhaemi

3. BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR PADA SEKOLAH DASAR DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

3.1 Masalah Penelitian

Masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah dasar di Daerah Istimewa Aceh meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1.1 Sampai berapa jauh sekolah-sekolah dasar di Daerah Istimewa Aceh menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- 1.2 Kesulitan-kesulitan apakah yang dihadapi guru di dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada sekolah dasar.
- 1.3 Adakah kemungkinan semua SD di Aceh menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas I dan faktor-faktor apakah yang membatasinya.

Penelitian yang dilakukan meliputi seluruh daerah Aceh dan menyangkut keadaan di kelas I sampai dengan kelas VI, dari sejumlah sekolah dasar yang dijadikan sebagai sampel.

3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini dalam rangka memecahkan masalah-masalah tersebut di atas ialah untuk memperoleh gambaran tentang pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, baik mengenai kemantapan pemakaiannya maupun tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi serta kemungkinan-kemungkinan penggunaan yang menyeluruh.

3.3 Hipotesis

Penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut: Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada beberapa sekolah dasar di Daerah Istimewa Aceh belum berjalan dengan mantap karena dipandang masih berfaedah menggunakan bahasa daerah.

3.4 Metode

Untuk pengumpulan data dipergunakan dua macam teknik, yaitu observasi dan wawancara.

- a) Observasi ditujukan kepada situasi mengajar dalam kelas yang diambil sebagai sampel.
- b) Wawancara ditujukan kepada murid, guru kelas, dan kepala sekolah yang diambil sebagai sampel.

3.5 Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah dasar di Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari 8 buah kabupaten dan 2 buah kotamadya. Jumlah SD 1.184 buah (termasuk SD Inpres dan swasta). Sebagai sampel penelitian diambil 58 buah SD negeri dengan mengambil 6 buah SD tiap-tiap kabupaten, kecuali untuk Kotamadya Banda Aceh hanya diambil sebanyak 4 buah. Keenam buah SD yang dimaksud masing-masing terbagi 2 buah pada setiap lokasi yaitu: kota, pinggiran kota, dan desa.

Di kotamadya Banda Aceh, sebagai ibu kota propinsi, hanya diselidiki SD di kota dan pinggiran kota saja mengingat situasi desa sulit dibedakan dengan kota, lagi pula sekolah-sekolah yang agak jauh dari pusat kota sudah merupakan bagian dari daerah kabupaten Aceh Besar. Sedangkan dasar pikiran menetapkan lokasi itu adalah untuk melihat perbedaan situasi yang dapat mempengaruhi penggunaan bahasa di sekolah dari ketiga macam lokasi yang dimaksud. Tiap SD yang dimaksud diambil 6 kelas yaitu kelas I-VI yang semuanya berjumlah 348 buah kelas. Tiap kelas tersebut diambil 2 orang murid (pandai dan kurang pandai) dan seorang guru kelas, yang masing-masing berjumlah 696 orang murid dan 348 orang guru. Selanjutnya 58 orang kepala sekolah sesuai dengan sekolah yang diambil sebagai sampel.

3.6 Waktu

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut .

1. Persiapan : 1 September s.d. 15 Oktober 1976
2. Pengumpulan data : 16 Oktober s.d. 14 November 1976
3. Pengolahan data : 15 November s.d. 25 Januari 1977

4. Penyusunan laporan : 26 Januari s.d. 24 Pebruari 1977
5. Reproduksi laporan : 25 Pebruari s.d. 14 Maret 1977
6. Penyampain laporan : 15 Maret 1977.

3.7 Kesimpulan

3.7.1 *Kesimpulan Khusus*

a. **Penggunaan Bahasa Pengantar dalam Situasi Mengajar**

Sebagian besar guru mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam situasi mengajar, terutama pada SD kota dan pemakaian bahasa Indonesia untuk SD di pinggir kota dan desa dimulai pada kelas IV-VI. Tetapi bagi guru-guru SD kelas I-III di pinggir kota dan desa tidak demikian halnya, mereka lebih banyak mencampuradukkan pemakaiannya dengan bahasa daerah. Dalam penggunaan bahasa Indonesia umumnya baik, hanya sebagian kecil saja yang kurang terutama pada SD pinggir kota dan desa di kelas I-III.

Kesimpulan di atas ada hubungannya dengan pendapat murid yang memperlihatkan bahwa umumnya murid-murid dapat mengerti bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh guru-guru. Masih di dalam situasi mengajar, murid-murid umumnya (85%) mempergunakan bahasa Indonesia pada saat hubungan dengan guru-guru. Keadaan ini diperkirakan ada hubungannya dengan perasaan murid untuk menggunakan bahasa Indonesia. Umumnya mereka senang berbicara dalam bahasa Indonesia, berani mengajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Situasi ini dibenarkan oleh guru-guru pada umumnya, terutama sekali pada lokasi kota. Tetapi 7% dari murid-murid kelas I-III, terutama pada SD pinggir kota dan desa, lebih banyak menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, guru. Untuk mengatasi ini, guru memberikan petunjuk pemakaian bahasa Indonesia tersebut.

b. **Penggunaan Bahasa Indonesia di Luar Situasi Mengajar**

Pada umumnya terutama pada lokasi luar kota guru-guru mempergunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah bila berbicara dengan murid-muridnya di luar situasi mengajar. Sedangkan sesama guru itu sendiri lebih banyak menggunakan bahasa daerah yang berlaku untuk ketiga lokasi. Adapun kepala sekolah *selalu* mempergunakan bahasa Indonesia dalam rapat-rapat dewan guru. Keadaan yang sedikit berbeda terlihat di antara

sesama murid itu sendiri, bahwa *pada umumnya* mereka tidak berbahasa Indonesia sesamanya, melainkan berbahasa daerahnya masing-masing. Keaktifan murid-murid untuk menggunakan bahasa Indonesia dapat diperkirakan dengan kegiatan murid-murid itu sendiri, misalnya mendengarkan siaran-siaran radio, membaca majalah/surat kabar, membaca buku bacaan anak-anak, dan buku-buku cerita yang bermutu lainnya. Hal semacam ini sangat kurang pada murid-murid SD di desa.

c. Kesulitan dan Hambatan dalam Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar

Sebagian besar murid-murid SD tidak mendapat kesulitan untuk berbahasa Indonesia kecuali bagi murid-murid kelas I-III SD pinggir kota dan desa. Hal ini diperkirakan karena pada umumnya murid-murid senang berbahasa Indonesia. Sedangkan bagi murid-murid kelas I-III itu perbendaharaan bahasanya masih sangat kurang.

Keterangan ini menunjukkan bahwa sebagian kecil murid sekolah dasar mendapat kesulitan berbahasa Indonesia. Hal ini selain disebabkan karena kurangnya latihan dan perbendaharaan bahasa, juga karena bahasa daerah dan kebiasaan atau norma-norma sosial dalam masyarakat masih merupakan faktor penghambat dalam pengembangan bahasa Indonesia murid. Selanjutnya, atas dasar asumsi bahwa perpustakaan sekolah memberi pengaruh kepada kemampuan berbahasa Indonesia.

d. Kemungkinan Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar untuk Semua Kelas

Umumnya murid-murid itu baru mengenal bahasa Indonesia setelah masuk sekolah. Oleh karena itu, pada tahun-tahun pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar masih perlu banyak dicampur dengan bahasa daerah, terutama pada SD pinggir kota dan desa. Hal itu ada hubungannya dengan kesimpulan selanjutnya bahwa kemampuan murid SD di Aceh dalam berbahasa Indonesia masih belum baik. Namun demikian, pada umumnya pengajaran dapat berjalan lancar dengan menggunakan bahasa Indonesia terutama pada kelas-kelas yang tinggi. Akan tetapi masih ada sekolah-sekolah tertentu dan pada kelas-kelas rendah di pinggiran kota dan desa yang pengajarannya kurang lancar kalau digunakan bahasa Indonesia. Karena itu, bahasa daerah masih perlu digunakan sebagai bahasa pengantar di samping bahasa Indonesia.

3.7.2 Kesimpulan Umum

- a. Bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada semua SD di Aceh sudah dipergunakan oleh semua guru dari kelas I sampai dengan kelas VI. Tetapi pada kelas-kelas rendah terutama pada SD pinggir kota dan desa masih perlu mencampuri dengan bahasa daerah, demi kelancaran pengajaran.
- b. Penggunaan bahasa Indonesia di luar situasi mengajar agak kurang karena adanya pengaruh bahasa daerah, baik bagi kepala sekolah, guru-guru maupun bagi murid-murid itu sendiri. Situasi ini berlaku untuk ketiga lokasi, terutama pada lokasi pinggir kota dan desa.
- c. Kesulitan-kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar tidak besar, kecuali apabila sebagian besar murid kelas rendah pada SD pinggir kota dan desa yang belum bisa berbahasa Indonesia sebelum bersekolah. Namun, kebijaksanaan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang selalu dipakai di sekolah, dipandang oleh guru-guru dan kepala sekolah adalah mungkin dan perlu dilaksanakan.

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA MINANGKABAU
DI SUMATRA BARAT**

Oleh:

Jakub Isman, dkk.

4. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA MINANGKABAU DI SUMATRA BARAT

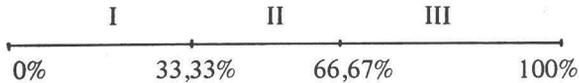
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki (1) kedudukan bahasa Minangkabau di Sumatra Barat, (2) fungsi itu tersebut sebagai media pergaulan dalam masyarakat, (3) peranannya sebagai bahasa pengantar di sekolah, (4) peranannya sebagai pendukung kebudayaan daerah, dan (5) fungsinya sebagai lambang identitas daerah. Pembicaraan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Minangkabau di Sumatra Barat tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia karena keduanya dipakai secara komplementer dan diterima oleh masyarakat sebagai media komunikasi yang berdampingan dan saling mengisi.

Daerah Sumatra Barat yang akan diselidiki meliputi wilayah seluas 42.297 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2.921.000 menurut perkiraan tahun 1974 (3.071.056 menurut sensus Pemilu 1977). Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam waktu yang relatif amat singkat, maka diperlukan sampel populasi yang terbatas, tetapi cukup representatif. Untuk keperluan itu telah ditetapkan 5 daerah penelitian yang berbeda status administratifnya sebagai sampel, yaitu sebuah ibu kota propinsi dan sebuah jorong (desa). Pada setiap daerah itu ditetapkan sebanyak 60 orang responden yang diambilkan dari 3 kelompok sosial yang berbeda, yaitu (a) kelompok pejabat pemerintah dan guru, (b) kelompok alim ulama dan pemuka adat, dan (c) kelompok masyarakat biasa. Kepada responden (yang semuanya berjumlah 300 orang itu) diberikan kuesioner yang terdiri dari 138 pertanyaan. Kuesioner tersebut ditanyakan dan di mana perlu diterangkan terlebih dahulu oleh petugas lapangan yang langsung mengisi jawaban yang diberikan oleh para

responden. Dengan jalan demikian, jawaban yang masuk lengkap jumlahnya.

Setelah data terkumpul, diadakan pengelompokan dan penganalisaan yang menghasilkan 30 buah tabel yang dapat dilihat dalam buku laporan tersendiri. Dari analisis itu diperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.

Dari hasil penelitian itu dapat dilihat bahwa bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia di Sumatra Barat memang berfungsi secara komplementer dan telah dapat pula diidentifikasi perbedaan kecenderungan pemakaian bahasa-bahasa tersebut. Untuk memperlihatkan perbedaan kecenderungan pemakaian bahasa-bahasa itu, dipakai skala prosentase horisontal, yaitu dari 0% pada titik paling kiri sampai 100% pada titik paling kanan. Skala ini dibagi dalam tiga kelompok kecenderungan sebagai berikut.



Bila pemakaian bahasa Minangkabau, misalnya, berada di daerah I (0% – 33,33%), maka diasumsikan bahwa bahasa itu (hampir) tidak berfungsi untuk jenis pembicaraan/tulisan yang sedang didiskusikan. Bila untuk jenis pembicaraan/tulisan itu pemakaian bahasa Indonesia berada di daerah III (66,67% – 100%), maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu berfungsi penuh untuk jenis percakapan/tulisan yang sedang dipertanyakan. Akan tetapi, bila bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia sama-sama berada di daerah II (33,33% – 66,67%), maka untuk jenis pembicaraan/ tulisan tertentu itu bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia diasumsikan sebagai berfungsi secara seimbang.

Selanjutnya penemuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahasa Minangkabau berkedudukan sebagai bahasa daerah di Sumatra Barat dengan fungsi-fungsi yang akan menjadi jelas pada keterangan-keterangan lebih lanjut nanti. Bahasa Indonesia di Sumatera Barat berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Khusus untuk komunikasi tulisan, ternyata bahasa Indonesia telah pula mengambil sebagian dari kedudukan bahasa Minangkabau karena telah dipakai dalam surat-menyurat dalam lingkungan keluarga dan antara sesama suku Minangkabau. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi tulisan di Sumatra Barat rata-rata prosentase pemakaian bahasa Indonesia ialah 96,54%,

sedangkan pemakaian bahasa Minangkabau hanya 3,46%. Kecenderungan ini terdapat pada semua daerah penelitian (dari kota propinsi sampai desa) dan pada semua kelompok sosial (dari pejabat pemerintah sampai orang biasa). Dalam komunikasi tulisan bahasa Minangkabau boleh dikatakan hampir tidak berfungsi.

2. Dalam komunikasi lisan, bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia berfungsi secara komplementer. Untuk percakapan intraetnis (yaitu antara sesama orang Minangkabau) bahasa Minangkabau memegang peranan penuh. Rata-rata prosentase pemakaian bahasa Minangkabau untuk jenis percakapan ini ialah 96,02%, sedangkan pemakaian bahasa Indonesia meliputi hanya 3,93%, dan bahasa lain hanya 0,05%. Untuk percakapan antaretnis (yaitu percakapan dengan orang dari suku lain), bahasa Indonesia yang memegang peranan penuh. Rata-rata prosentase pemakaian bahasa Indonesia untuk jenis percakapan ini ialah 87,28%, sedangkan pemakaian bahasa Minangkabau meliputi hanya 12,62% saja. Kenyataan ini mendasari kesimpulan tentang kedudukan bahasa Minangkabau sebagai bahasa daerah dan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

3. Komunikasi formal dan komunikasi informal tidaklah begitu menentukan bagi pilihan pemakaian bahasa Minangkabau atau bahasa Indonesia. Yang mempengaruhinya ialah kenyataan apakah pembicaraan itu bersifat antaretnis atau bersifat intraetnis. Walaupun begitu, jika dibandingkan pembicaraan antaretnis yang formal dan yang informal, atau jika dibandingkan pembicaraan intraetnis yang formal dan yang informal, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembicaraan formal mengundang lebih banyak pemakaian bahasa Indonesia, sedangkan pembicaraan informal mengundang lebih banyak pemakaian bahasa Minangkabau. Tetapi jika dibandingkan pembicaraan informal antaretnis dengan pembicaraan formal antaretnis, maka untuk yang tersebut terdahulu lebih banyak dipakai bahasa Indonesia, karena variabel "antaretnis" lebih dominan dari variabel "informal." Untuk jenis pembicaraan yang kedua, lebih banyak pemakaian bahasa Minangkabau karena variabel "intraetnis" lebih dominan dari variabel "formal."

4. Jika dibandingkan pilihan pemakaian bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia menurut motif atau alasan yang diberikan oleh para penutur sendiri, maka ternyata mereka lebih suka memakai bahasa Minangkabau untuk menyatakan rasa intim (94,67%) dan rasa hormat (92,67%), untuk lebih mampu mengungkapkan perasaan (77,33%) dan agar lebih mudah memahami (69,66%). Mereka lebih suka memakai bahasa Indonesia untuk memperluas ruang lingkup dan untuk menjangkau lebih banyak pendengar

(98,65%) dan bila pembicaraan bersifat nasional (93,24%). Untuk dapat disenangi dan agar pembicaraan lebih efektif dan efisien, para penutur beranggapan bahwa bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia berfungsi secara seimbang.

5. Pembagian daerah penelitian ke dalam lima daerah administratif yang berbeda, rupanya tidak mencerminkan pola perbedaan fungsi bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia. Data menunjukkan bahwa yang signifikan ialah perbedaan antara pemakaian bahasa di kota (kota propinsi dan kotamadya) dan di desa (ibu kecamatan, ibu kenagarian, dan jorong). Untuk komunikasi lisan dan tulisan ternyata di kota rata-rata pemakaian bahasa Minangkabau meliputi 28,87% dan pemakaian bahasa Indonesia meliputi 70,92%, dan bahasa lain hanya 0,21%. Pemakaian bahasa Minangkabau di desa meliputi 41,97%, pemakaian bahasa Indonesia meliputi 57,69%, dan pemakaian bahasa lain hanya 0,34%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan untuk lebih banyak memakai bahasa Minangkabau di desa dan lebih banyak pemakaian bahasa Indonesia di kota.

6. Pemakaian bahasa Minangkabau sebagai bahasa pengantar di sekolah amat terbatas. Pada umumnya bahasa pengantar yang dipakai ialah bahasa Indonesia untuk semua jenis dan tingkatan sekolah. Pada kelas I dan II sekolah dasar terdapat pemakaian bahasa Minangkabau sebagai bahasa pengantar yang jumlah pemakaiannya terbatas antara 25% dan 50% saja.

7. Bahasa Minangkabau masih berfungsi secara aktif dalam pengembangan kebudayaan daerah dan sekaligus juga masih berfungsi sebagai lambang dari identitas daerah Sumatra Barat. Indikator kebudayaan daerah dapat dilihat dalam ciri-ciri khasnya, seperti dalam kesusasteraan, kesenian, dan upacara-upacara adat daerah itu. Bahasa Minangkabau masih aktif dipakai dalam aspek-aspek kebudayaan yang khas ini, seperti dalam kaba dan randai, dalam lagu-lagu tradisional maupun lagu populer daerah, dalam penulisan cerita pendek, cerita bersambung, dan beberapa rubrik khusus di surat kabar daerah. Bahasa Minangkabau masih pula dipakai dalam upacara-upacara adat dan dipakai pula pakaian adat daerah dan diperdengarkan musik tradisional daerah. Sebaliknya, aspek-aspek khusus dari kebudayaan daerah Sumatra Barat dapat pula diidentifikasi karena pemakaian bahasa Minangkabau yang mengiringinya. Kelompok masyarakat Minangkabau di rantau dapat pula diidentifikasi dari bahasa Minangkabau yang sering mereka pakai.

**SASTRA LISAN MINANGKABAU :
TRADISI PASAMBAHAN HELAT PERKAWINAN**

**Oleh :
Jamil Bakar, dkk.**

5. **SASTRA LISAN MINANGKABAU: TRADISI PASAMBAHAN HELAT PERKAWINAN**

Dipilihnya bentuk pasambahan dalam Helat Perkawinan sebagai objek penelitian oleh karena jenis ini paling umum dan tinggi frekuensi pemakaiannya dalam masyarakat dibandingkan dengan jenis-jenis pasambahan lain. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan dan mendokumentasikan pasambahan yang lengkap untuk wilayah adat Minangkabau. Pasambahan merupakan bentuk sastra lisan yang cukup unik yang sekaligus dijadikan media dalam penyampaian petuah-petuah, ajaran-ajaran, dan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan. Bentuk sastra ini sangat digemari orang dan populer di kalangan masyarakat Minangkabau dari semua tingkat usia.

Lokasi penelitian Pasambahan Helat Perkawinan dipilih berdasarkan pembagian wilayah adat Minangkabau dan tidak menurut pembagian daerah administrasi pemerintahan oleh karena sasaran penelitian berkaitan dengan adat istiadat yang lebih bergayut mengikuti wilayah adat.

Daerah yang dipilih adalah: (1) Kenagarian Pasir Lawas, yang mewakili Tanah Datar; (2) Kenagarian Taluk, yang mewakili Luhak Agam, (3) Kenagarian Koto Nan Ampek, yang mewakili Lima Puluh Koto; (4) Kenagarian Aro, yang mewakili Kubung XIII; dan (5) Kenagarian Koto Tengah yang mewakili Daerah Rantau Pesisir.

Oleh karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mentranskripsikan pasambahan di samping hendak mengetahui latar belakangnya, maka teknik yang dipergunakan ialah angket, wawancara, dan rekaman.

Dua macam tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan teknik angket, yaitu : (1) data dari ahli pasambahan; (2) data dari anggota dan pemuka masyarakat yang terdiri dari pejabat pemerintah, ninik mamak, alim

ulama, cerdik pandai, dan pemuda. Daftar pertanyaan untuk ahli pasambahan sebanyak 5 buah untuk tiap daerah penelitian, sedangkan daftar pertanyaan untuk anggota masyarakat sebanyak 75 buah untuk setiap daerah.

Sambah-manyambah merupakan keahlian yang hanya dilakukan oleh orang tertentu. Untuk menjadi ahli pasambahan diperlukan persyaratan antara lain, kepribadian, terampil, dan tangkas dalam berpetatah-petitih. Pada umumnya mereka baru menguasai pasambahan setelah mereka dewasa, matang, dan sudah kawin. Pengetahuan yang mereka peroleh kebanyakan melalui belajar dengan orang lain secara adat, ditambah pengetahuan melalui buku-buku.

Keahlian dalam hal pasambahan ini secara materil memang tidak begitu diharapkan. Yang merasakan mendapat keuntungan materil hanya sedikit sekali (25,7%). Selebihnya hanya merasa mendapat keuntungan moril dan juga dalam hubungan statusnya dalam masyarakat (74,3%). Namun, dengan keuntungan itu saja mereka sudah puas. Dari data itu, meskipun yang didapatnya hanya keuntungan moril dan kehidupan sebagai ahli pasambahan tetap menarik. Bukan saja menarik oleh para ahli pasambahan yang ada, tetapi juga akan terlihat dari minat orang yang ingin mempelajarinya (87,8%).

Dari data yang dikumpulkan melalui angket yang disebar, pengembangan melalui kursus-kursus, pembinaan sebagai ahli pasambahan tampaknya diperlukan di samping untuk membina pasambahan itu sendiri.

Bagaimana hubungan pasambahan dengan masyarakat? Pertama, hal ini dapat dilihat dari sambutan masyarakat sendiri terhadap acara pasambahan itu. Dari pertanyaan yang diajukan terhadap berbagai kalangan masyarakat, umumnya menjawab (97,4%) bahwa mereka masih tetap menyenangi acara pasambahan. Kedua, tampaknya kepandaian sebagai ahli pasambahan ini juga diturunkan. Dalam arti kata bahwa kepandaian "sambah-manyambah" (dengan menggunakan pasambahan) juga diajarkan baik kepada kalangan dekat secara kekeluargaan maupun kepada murid-murid lain dari luar kalangan sendiri.

Agaknya, beberapa perubahan dan perbaikan terhadap acara pasambahan ini memang perlu dilakukan. Dari beberapa angket yang diajukan, beberapa orang di antaranya mengusulkan diadakan perbaikan terutama terhadap perulangan-perulangan atau *rede* yang dianggap dapat menimbulkan kebosanan.

Mengapa masyarakat masih menyukai tradisi pasambahan ini? Sebanyak 60,4% menjawab disebabkan, nilai isi yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan sebagian lain (39,6%) menjawab karena nilai hiburannya. Bila diperinci kecenderungan responden tentang nilai dari sebuah pasambahan terlihat adanya nilai sastra dan keindahannya 41,9%, nilai moral dan agama 32% serta nilai tradisi 26,1%.

Perlu diketahui jenis-jenis pasambahan banyak ditentukan oleh jenis acara dan upacara. Dalam upacara helat perkawinan, biasanya dikenal tiga jenis acara helat, yaitu helat besar, helat menengah dan helat yang sederhana. Jenis pasambahan juga tiga macam: panjang, menengah, dan pendek. Mengenai nama di masing-masing daerah juga berbeda. Untuk daerah Koto Tangah dan Padang Pariaman bernama si Marajo Lelo, si Marajo Kayo, dan si Marajo Kaciak. Untuk daerah Agam disebut, Taberai, Manangah, dan Pangga Batang. Untuk daerah Tanah Datar disebut Pidato, Panitahan, dan Pakolah-an. Untuk daerah Lima Puluh Koto disebut Lomang Urek, Kubuang Batang, dan Gonteh Pucuk. Sedangkan untuk Kubung XIII (Solok), Jamba Gadang, Gulai Manih, dan Alek Ketek.

Dari berbagai ragam pasambahan yang terdapat pada lima daerah penelitian itu, kita melihat adanya persamaan-persamaan dalam sistematik penyampaian. Umumnya setiap pasambahan itu dimulai dengan Pasambahan Siriah, kemudian dilanjutkan dengan Pasambahan Makan, Pasambahan Minta Pulang, dan ditutup dengan Pasambahan Minta Kerelaan. Namun demikian, terdapat juga perbedaan-perbedaan dan variasi-variasi dari masing-masing pasambahan itu. Tidak dalam isi dan esensi, tetapi terbatas dalam istilah dan dalam beberapa sistematik penyampaian. Agaknya hal ini berpangkal dari perbedaan kebiasaan dan tata cara lingkungan setempat.

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pasambahan dalam Helat Perkawinan adalah merupakan satu jenis pasambahan dari sekian banyak pasambahan lainnya yang masih hidup dalam masyarakat Minangkabau yang sukar dicari dalam bentuk tertulis.
2. Pasambahan yang dituturkan dalam bentuk prosa liris dan pantun menunjukkan bahwa masih terpeliharanya bentuk sastra lisan Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang.
3. Pasambahan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat Minangkabau dan digemari oleh segenap lapisan masyarakat, baik oleh masyarakat yang berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi, baik oleh mereka yang tinggal di desa maupun di kota.
4. Dengan cukupnya penggemar serta orang-orang yang mau mempelajari pasambahan, merupakan pertanda baik dalam pembinaan dan pengembangan kesenian daerah, sesuai dengan fungsinya sebagai penunjang kebudayaan nasional.

RINGKASAN HASIL PENELITIAN
KOSA KATA BAHASA INDONESIA
MURID KELAS I SEKOLAH DASAR DI SUMATRA BARAT

Oleh :

Barhaya Ali, dkk.

6 KOSA KATA BAHASA INDONESIA MURID KELAS I SEKOLAH DASAR DI SUMATRA BARAT

Penelitian ini bertujuan menghimpun data sahih tentang jumlah kosa kata yang sungguh-sungguh dikuasai oleh murid kelas I sekolah dasar di Sumatra Barat, kemudian diproyeksikan dalam program pengajaran kosa kata yang mantap, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal yang sedang digalakkan.

Sekolah dasar yang diteliti berjumlah 2439 buah dengan jumlah murid kelas I sebanyak 114.951 orang. (Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data, Bagian Perencanaan, Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatra Barat, 1976). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam waktu yang relatif sangat singkat serta dengan biaya yang relatif terbatas, maka diperlukan sampel populasi yang terbatas tetapi cukup representatif dengan cara *proporsive random sampling*. Untuk keperluan itu, telah ditetapkan 4 daerah penelitian yang berbeda status administratifnya sebagai sampel, yaitu 2 buah sekolah dasar ibu kota propinsi, 2 buah sekolah dasar ibu kotamadya/kabupaten, 2 buah sekolah dasar ibu kecamatan, dan 2 buah sekolah dasar ibu kenagarian. Pada setiap sekolah dasar itu ditetapkan sebanyak 6 orang responden yang diambilkan dari 3 kelompok tingkat kecerdasan yang berbeda, yaitu (a) 2 orang kelompok murid yang pandai, (b) 2 orang kelompok murid yang sedang, dan (c) 2 orang kelompok murid yang bodoh. Responden yang semuanya berjumlah 48 orang itu diujikan sejumlah 1.683 patah kata dengan bantuan gambar-gambar, peragaan, dan penjelasan peneliti.

Setelah data terkumpul, diadakan pengelompokan dan analisis yang dapat dilihat dalam buku laporan penelitian. Dari analisis itu diperoleh kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, tidak sebuah kata pun yang diteliti yang tidak diketahui oleh semua sampel. Secara asuntif dapat diduga bahwa penguasaan kata murid kelas I sekolah dasar di Sumatra Barat jauh lebih besar dari pada yang diperkirakan semua. Kedua, kata-kata yang dikuasai oleh 75% anak adalah sebanyak 1.433 dari 1.683 kata yang diteliti, sedangkan yang dikuasai oleh 25% anak berjumlah 2 buah. Ketiga, penelitian kosa kata murid kelas I sekolah dasar memerlukan perencanaan yang matang, ketekunan, kesabaran, dan ketrampilan, karena harus menghadapi murid yang baru berada di bangku pendidikan formal. Terakhir, kemampuan menggunakan metode peragaan, gambar, dan penjelasan dengan bahasa peneliti, banyak menentukan berhasil tidaknya penelitian.

**PEMAKAIAN BUKU PELAJARAN BAHASA INDONESIA
PADA SEKOLAH DASAR DI SUMATRA BARAT**

Oleh :

Abd. Razak, dkk.

7. PEMAKAIAN BUKU PELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SEKOLAH DASAR DI SUMATERA BARAT

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui masalah yang terdapat dalam pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia pada sekolah dasar di daerah Sumatera Barat kemudian memberikan rekomendasi, baik untuk usaha-usaha perbaikan maupun bagi usaha-usaha penelitian selanjutnya terhadap aspek-aspek lain pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar pada masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan itu, penelitian ini bertitik tolak dari lima macam buku pelajaran bahasa Indonesia yang dewasa ini digunakan di sekolah dasar. Buku-buku yang dimaksud ialah (1) *Bahasaku*, oleh B.M. Nur dan W.J.S. Purwadarminta, terbitan PT Tiara, Bandung; (2) *Bahasa Kita*, oleh Baidillah Halim, B.A., dkk, terbitan Remaja Karya, Bandung; (3) *Bahasa Nasional*, oleh Alfian, B.A., dkk, terbitan Fa Maju, Medan; (4) *Mahir Berbahasa Nasional*, oleh Muh. Kasim dkk., terbitan PT Sanggabuwana, Jakarta, dan (5) *Bahasa Indonesia*, hasil paket buku Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Semula, untuk melaksanakan penelitian ini dilokasikan waktu selama enam bulan (Agustus 1976 sampai dengan Januari 1977). Akan tetapi pelaksanaannya terpaksa mengalami pengunduran selama kurang lebih dua bulan sehingga rencana kerja yang sudah terperinci turut berubah seluruhnya. Terjadinya pengunduran itu ada hubungannya dengan terlambatnya biaya sampai di tangan pelaksana.

Penelitian ini dilaksanakan oleh suatu tim, yang tersusun dari staf pengajar FKSS—IKIP Padang. Data dikumpulkan dari lokasi (1) Kota Padang, mewakili ibu kota propinsi, (2) Painan, mewakili ibu kota kabupaten, (3) Payakumbuh, mewakili kotamadya, (4) Talang, mewakili ibu kota kecamatan, dan (5) Kamang, mewakili kenagarian. Pada masing-masing tem-

pat itu dipilih tiga buah sekolah dasar, satu di antaranya diambil sekolah dasar yang terletak di daerah pusat, sedang dua lainnya di daerah agak ke pinggir dan yang jauh terpencil. Dengan demikian, diperoleh lima belas buah sekolah dasar dengan situasi serta lingkungan yang berbeda.

Informasi diperoleh dari sumber berikut: (1) murid-murid 150 orang, (2) guru kelas 45 orang, (3) kepala sekolah 15 orang, (4) staf Kandep dan Kanwil 33 orang, (5) pengusaha toko buku 8 orang, dan (6) kalangan P3D sebanyak 2 orang. Seluruh responden berjumlah 253 orang.

Untuk memperoleh informasi digunakan tiga macam metode, masing-masing: (1) pengamatan yang ditujukan untuk mendapatkan data mengenai situasi perpustakaan sekolah, (2) angket yang dilaksanakan secara tidak terselubung, dan (3) wawancara guna lebih melengkapi data yang sudah ada. Sedang untuk pengolahan data digunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif, yang hasilnya dihimpun dalam satu buah buku laporan hasil penelitian.

Selanjutnya ada dua macam data yang dapat dilaporkan sebagai hasil penelitian yaitu data utama dan data tambahan. Yang pertama meliputi berbagai sisi tentang masalah pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia pada sekolah dasar di Sumatra Barat, sedang yang satu lagi mencakup sisi lain yang erat kaitannya dengan masalah tersebut.

Menurut garis besarnya, ternyata ada dua jenis buku pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan. Jenis yang pertama adalah buku-buku yang tergolong hasil paket buku Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedang yang satu lagi ialah buku-buku yang tidak tergolong ke dalam buku paket. Jenis yang kedua yang tidak tergolong buku paket adalah buku *Bahasa Nasional*, terbitan Fa. Maju, Medan. Semua (100%) sekolah dasar di sini menggunakan buku itu untuk pegangan murid, sejak kelas terendah sampai dengan kelas VI. Pemakaian buku itu sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 3 a 4 tahun, sedang yang digunakan sebelumnya adalah *Bahasaaku*, terbitan PT Tiara, Bandung.

Mengapa buku *Bahasa Nasional* yang dipakai, ternyata tidak terdapat alasan yang prinsipil. Pemilihan buku itu bukanlah didasarkan kepada suatu hasil evaluasi tertentu, atau berdasarkan prinsip tertentu pengajaran bahasa, melainkan karena kebetulan buku inilah satu-satunya buku pelajaran bahasa Indonesia bagi sekolah dasar yang secara intensif dipasarkan di daerah ini. Faktor-faktor kemudahanlah yang mendasari pemakaian jenis buku tertentu, baik kemudahan dalam memperoleh di toko-toko buku, maupun dalam pemesanannya kepada penerbit. Segi lain ialah karena belum

adanya suatu pola yang mantap dalam hal pengadaan buku pelajaran bagi sekolah-sekolah. Kecuali yang berhubungan dengan buku paket, soal memperoleh buku pelajaran dipandang sebagai urusan sekolah atau urusan murid semata-mata. Dari instansi yang lebih atas, pengiriman buku secara teratur, misalnya pada awal, pertengahan, atau di akhir tahun ajaran, boleh dikatakan belum ada.

Dalam mengajarkan bahasa Indonesia di kelas, guru-guru umumnya masih terlalu bertaklid kepada buku dan bukan kepada kurikulum. Buku itu seakan-akan dianggap telah demikian lengkap bagi keperluan materi pelajaran yang perlu diajarkan. Guru tidak memiliki buku lain sebagai buku sumber, kecuali buku yang serupa betul dengan buku yang digunakan murid. Mungkin sekali hal ini disebabkan karena pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar masih menggunakan sistem guru vak. Seorang guru kelas terpaksa harus mengelola semua bidang studi yang perlu dipelajari murid di kelasnya.

Tiadanya dasar yang kuat dalam hal pemilihan buku pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ternyata telah mengembangkan sikap tertentu bahwa setiap guru sekolah dasar merasa mampu dan dianggap mampu mengajarkan bahasa Indonesia.

Dilihat dari sudut murid, sebetulnya mereka dapat memperoleh pelajaran bahasa Indonesia dari berbagai sumber buku. Tetapi di sekolah dasar prinsip ini masih belum diterapkan, murid-murid masih dibiasakan mengenal satu jenis buku, dan itu pun belum semua murid memilikinya. Hal ini bertalian dengan faktor ekonomi orang tua murid dan sebagian lagi dengan faktor kurang lancarnya komunikasi. Di toko-toko buku ada kalanya terdapat persediaan buku yang menumpuk, tetapi ada kalanya toko buku tidak dapat memenuhi keperluan sekolah berhubung habisnya persediaan.

Sepanjang menyangkut pemakaian hasil paket buku pelajaran bahasa Indonesia diperoleh gambaran seperti berikut. Buku paket itu telah digunakan di semua sekolah dasar di daerah ini, setidaknya-tidaknya sejak 1 sampai dengan 3 tahun terakhir. Jadi, ada sekolah yang telah menggunakan buku tersebut sampai dengan kelas III, tetapi ada pula di antaranya yang baru memulai kelas I. Masalahnya bertalian dengan terlambatnya sekolah yang bersangkutan mengikuti penataran atau kelambatan menerima buku paket.

Penyaluran buku paket ke sekolah-sekolah berlangsung melalui dua jalur. Sampai dengan buku jilid II, penyalurannya langsung ditangani Dinas P dan K, sedang jilid III oleh proyek P3D. Hal yang sama dialami oleh buku paket bahasa Indonesia untuk pedoman guru dan pedoman khusus. Sistem penyaluran masih memerlukan penyempurnaan.

Selanjutnya sebagai data tambahan dapat dikemukakan hal-hal yang bertalian dengan sarana menunjang dan prospek. Perpustakaan sekolah masih belum dapat dikatakan sudah dikelola menurut semestinya. Ternyata belum satu pun sekolah dasar yang telah memiliki ruang khusus untuk perpustakaan. Apa yang disebut perpustakaan sekolah tak lain berupa kumpulan buku. Pengelolaannya masih jauh dan sekolah belum memiliki guru perpustakaan yang dibebaskan dari tugas mengajar di kelas.

Partisipasi toko buku cukup positif. Yang diperlukan oleh pengusaha toko buku adalah komunikasi yang teratur serta kebijaksanaan yang menyeluruh dari pihak yang berwenang dalam hal pengadaan buku-buku pelajaran untuk sekolah-sekolah.

Penggunaan bahasa Indonesia sejak kelas-kelas terendah seperti yang terdapat pada kedua jenis buku tersebut di atas ternyata tidak merupakan masalah. Boleh dikatakan tidak timbul kesulitan dalam hal itu baik di pihak murid maupun di kalangan guru. Proses pemakaian bahasa Indonesia dalam hal ini memberi harapan, lebih-lebih kalau aspek-aspek linguistiknya dapat diusahakan lebih efektif dan lebih efisien lagi.

Prospek lainnya ialah adanya sikap terbuka di kalangan guru-guru dalam menerima dan melaksanakan metode baru seperti yang terdapat dalam buku paket. Walaupun metode ini pada umumnya baru bagi guru-guru, namun, melalui penataran-penataran dapat diusahakan penyesuaian yang diperlukan.

Akhirnya, penelitian ini dapat merumuskan beberapa rekomendasi yang pokok, sebagai berikut: (1) perlu sekali diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap segi lain pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar, seperti segi materi, penggunaan bahasa, perwajahan, dan lain-lain; (2) perlu adanya suatu instansi khusus pada kantor-kantor departemen yang bertanggungjawab tentang pemakaian buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah; (3) pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas-kelas terendah sekolah dasar dapat dipertahankan terus; (4) perpustakaan sekolah sebagai sarana pemungisian buku-buku pelajaran perlu sekali lebih banyak mendapat pembinaan dan pengembangan, meliputi segala seginya, penggunaan buku lain untuk pendamping buku paket, sepatutnya dilakukan melalui pemanfaatan teknik-teknik evaluasi buku pelajaran; (6) penataran guru-guru masih perlu dilanjutkan dan materinya perlu diperkaya dengan masalah-masalah perbukuan; (7) masih ada yang perlu disempurnakan tentang penyaluran buku-buku pelajaran pada umumnya bagi sekolah-sekolah, terutama Sekolah Dasar.

UNDAK – USUK BAHASA SUNDA

Oleh :

Tini Kartini

Ma'mur Danasasmita

Agus Permadi

Dudu Prawira Atmaja

8. UNDA—USUK BAHASA SUNDA

8.1 Pendahuluan

Seperti halnya dengan bahasa Jawa, Madura, dan Bali, bahasa Sunda mengenal pola tingkat-tingkat bahasa yang dipergunakan untuk mengekspresikan rasa hormat berdasarkan status pemakaiannya. Tingkat-tingkat bahasa Sunda ini disebut *undak-usuk* bahasa.

Dalam perkembangannya, *undak-usuk* bahasa ini telah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat pemakainya.

Sekitar tahun lima puluhan telah terjadi polemik tentang kedudukan *undak-usuk* bahasa Sunda (UUBS). Di satu pihak menginginkan agar tingkat-tingkat bahasa ini, terutama tingkat bahasa *lemes*, dihilangkan dengan alasan bahwa tingkat-tingkat bahasa ini adalah warisan zaman feodal dan kolonial. Karena itu, tidak sesuai lagi untuk dipergunakan pada zaman demokratis seperti sekarang ini.

Di pihak lain orang menganggap bahwa bahasa Sunda yang demokratis adalah bahasa *lemes* dengan alasan bahwa sebagai bangsa yang telah merdeka dan beradab seyogyanyalah dalam percakapan sehari-hari mempergunakan bahasa *lemes* sebagai tanda saling hormat-menghormati tanpa melihat status sosial masing-masing.

Walaupun kedudukan UUBS ini pernah dipersoalkan, akan tetapi pada kenyataan yang terlihat dewasa ini, usaha pemakaian bahasa Sunda yang beragam masih tampak. Oleh karena itu, UUBS ini masih merupakan bagian yang penting dalam bahasa Sunda. Hanya saja ada anggapan dari sementara kalangan masyarakat Sunda bahwa pemakaian bahasa Sunda untuk kepentingan sopan santun dan penghormatan yang sekarang dipakai itu menyimpang atau melanggar konsep UUBS yang pernah mereka kenal.

Timbul pertanyaan apakah pemakaian UUBS sekarang ini masih sesuai dengan konsep UUBS yang dahulu pernah dikenal dalam bahasa

Sunda atau tidak? Dan sampai di manakah konsep UUBS yang dahulu pernah dikenal dalam bahasa Sunda itu mengalami perubahan dan pergeseran.

Bertitik tolak dari masalah serta pertanyaan tersebut diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- (a) memerikan (mendeskripsikan) konsep teoritis UUBS;
- (b) memerikan (mendeskripsikan) perubahan-perubahan serta kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam pemakaian UUBS;
- (c) menyimpulkan sudah berapa jauh perubahan-perubahan serta kesalahan-kesalahan itu terjadi.

A Ada dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

- (a) UUBS sekarang menyimpang dari konsep-konsep UUBS sehingga terjadi beberapa perubahan dan kesalahan-kesalahan;
- (b) UUBS ini sekarang menjadi sederhana.

8.2 Proses Hasil Penelitian

Pada dasarnya metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan angket.

Dari hasil studi kepustakaan diperoleh data tentang latar belakang lahirnya tingkat-tingkat bahasa dalam bahasa Sunda dan enam buah konsep UUBS, ialah konsep S. Coolsma, DK Ardiwinata, R. Satjadibrata, R.S. Adiwidjaja, R. Momon Wirikusumah dan I. Buldan Djajawiguna, dan konsep Husein Widjajakusumah.

Tentang latar belakang lahirnya UUBS umumnya berpendapat bahwa tingkat-tingkat bahasa dalam bahasa Sunda ini adalah pengaruh bahasa Jawa yang lahir setelah Sunda (Priangan) dikuasai oleh Mataram kira-kira pada abad ke-17. Pendapat ini dilontarkan oleh S. Coolsma, DK. Ardiwinata, MA Salmun, Harsojo, dan Saleh Danasasmita.

Keenam konsep UUBS itu dapat dikemukakan bahwa pembagian tingkat-tingkat bahasa dalam keenam konsep tersebut semuanya hampir sama. Pada umumnya keenam konsep itu membagi UUBS dalam tiga golongan besar: *kasar*, *lemas*, dan *penengah*; kecuali S. Coolsma dan Husein Widjajakusumah yang membaginya dalam dua golongan: *kasar* dan *lemes*.

Golongan *basa kasar* dibagi lagi menjadi dua tingkat: *kasar (cohag-cohag pisan, songong pikeun nyarekan)*. Golongan *basa lemes* dibagi lagi menjadi tiga tingkat: *sedeng (panengah, lemes keur ka sorangan, lemes*

pikeun un ngahormat, lemes persona ka I); *lemes (kawi, lemes biasa, lemes pikeun nu dihormat, lemes persona ka II)*; *lemes pisan (luhur)*. Pada Konsep Maman dan Buldan basa lemes ini hanya dibagi dua tingkat: *sedeng* dan *lemes*.

Ada bermacam-macam situasi pemakaian UUBS. Dari keenam konsep itu ditemukan 35 situasi pemakaian. Ke-35 situasi pemakaian itu terjadi dengan pembicara (persona I sebagai pusat yang berbicara) membiarkan persona II dan III dari tiga golongan tingkat sosial berdasarkan perbedaan umur, kedudukan, dan hubungan kekerabatan.

Ketiga golongan itu ialah golongan yang lebih tinggi daripada persona I (dua tingkat); golongan yang sama/ sederajat dengan persona I; golongan yang lebih rendah daripada persona I (dua tingkat).

Selain itu, diketahui pula bahwa fungsi bahasa *lemes* telah mengalami perubahan. Kalau menurut konsep UUBS sebelum Perang Dunia II (S. Coolsma dan DK Ardiwinata) fungsinya untuk menghormati golongan *menak*/orang yang lebih tinggi pangkat dan derajatnya; pada konsep setelah Perang Dunia II golongan *menak* ini tidak disebut-sebut lagi.

Bahasa *lemes*, selain berfungsi untuk menghormati orang yang lebih tinggi (umur, pangkat, dan hubungan kekerabatannya) dipergunakan pula untuk menghormati siapa saja yang ingin kita hormati. Begitu pula *basa kasar*, kalau dulu fungsinya untuk berbicara kepada dan dipergunakan di antara golongan *somah* (rakyat jelata) menurut konsep setelah Perang Dunia II fungsinya untuk berbicara dengan orang yang sudah akrab betul.

Untuk mengetahui sampai di mana perubahan dan kesalahan pemakaian UUBS ini telah disebarkan angket kepada 300 responden yang mewakili 50 kecamatan dari Kabupaten Bandung dan Tasikmalaya.

Angket itu berisi 775 butir tes, terdiri dari 2200 kalimat yang dibagi dalam tiga buah buku. Buku A angket tentang bahasa *lemes*, buku B angket tentang bahasa *sedeng*, buku C angket tentang bahasa *lemes pisan*, *kasar pisan* dan *panengah*. Ternyata tidak semua responden mengembalikan/mengisi buku angket tersebut. Angket A 259 responden, angket B 260 responden, dan angket C 255 responden.

Dari hasil analisis data angket itu diperoleh kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Kesalahan-kesalahan/penyimpangan-penyimpangan menurut perhitungan prestasi dari hasil pentabelan frekuensi pemakaian adalah seperti berikut.

- (a) pemakaian bahasa halus (BH) mencapai 25,98%
- (b) pemakaian bahasa halus sekali (BHS) mencapai 71,3%;
- (c) pemakaian bahasa sedeng (BS) mencapai 42,39%;

- (d) pemakaian bahasa kasar sekali (BKS) mencapai 59,6%;
 (e) pemakaian bahasa panengah (BP) mencapai 47,6%.

Selain itu, dari hasil pentabelan tersebut dapat diketahui kata-kata mana dari masing-masing tingkat UUBS itu yang frekuensi pemakaiannya tinggi.

Dengan berpedoman pada kriteria ukuran bahwa 100% berarti sesuai dengan ketentuan UUBS; 80 – 99% pemakaiannya banyak sekali; 60 – 79% pemakaiannya agak banyak; 40–59% pemakaiannya kurang banyak; 20 – 39% pemakaiannya sedikit; 1–19% pemakaiannya sedikit sekali, dan 0% berarti tidak dipakai lagi; diketahui data-data seperti berikut: dari 378 kata BH yang diperiksa terdapat 180 kata yang pemakaiannya *banyak sekali*; 93 kata yang pemakaiannya *banyak*; 45 kata yang pemakaiannya *kurang banyak*; 36 kata yang pemakaiannya *sedikit*; dan 25 kata yang pemakaiannya *sedikit sekali*.

Dari 20 kata BHS yang diperiksa terdapat: *dua kata* yang pemakaiannya *kurang banyak*; *sembilan kata* yang pemakaiannya *sedikit*; dan *tujuh kata* yang pemakaiannya *sedikit sekali*.

Dari 354 kata BS yang diperiksa terdapat; 35 kata yang *banyak sekali* pemakaiannya, 133 kata yang pemakaiannya *banyak*, 79 kata yang pemakaiannya *kurang banyak*, 72 kata yang pemakaiannya *sedikit*, dan 35 kata yang pemakaiannya *sedikit sekali*.

Dari 15 kata-kata BKS yang diperiksa terdapat: *satu kata* yang pemakaiannya *masih banyak*; *lima kata* yang pemakaiannya *kurang banyak*; *sembilan kata* yang pemakaiannya *sedikit*.

Dari 10 kata BP yang diperiksa terdapat: *dua kata* yang pemakaiannya *banyak sekali*, *dua kata* yang pemakaiannya *banyak*; *tiga kata* yang pemakaiannya *kurang banyak*, dan *tiga kata* yang pemakaiannya *sedikit*.

Untuk sampai pada kesimpulan, sudah berapa jauh perubahan-perubahan serta kesalahan-kesalahan pemakaian UUBS ini dan telah dibuat perhitungan statistik dengan mempergunakan $\chi^2 = \sum \frac{(fk - fh)^2}{fh}$. Pada taraf

signifikansi 1% dengan dugaan 50%–5%.

Dari perhitungan statistik itu diperoleh hasil seperti berikut.

- (1) Pemakaian BH pada sampel yang lebih luas, orang Sunda masa kini cenderung memilih kata-kata BH sebagaimana mestinya.
- (2) Pemakaian BHS pada sampel yang lebih luas, orang Sunda masa kini cenderung memilih pemakaian kata-kata BH.
- (3) Pemakaian BS pada sampel yang lebih luas, orang Sunda masa kini sebagian mempergunakan kata-kata BS dan sebagian lagi mempergu-

nakan pilihan lain.

- (4) Pemakaian BKS sudah mulai ditinggalkan dan pada proses tersebut orang Sunda saat ini cenderung mempergunakan BK.
- (5) Pemakaian BP, pada sampel yang lebih luas, orang Sunda masa kini sebagian mempergunakan BP dan sebagian lagi mempergunakan kata-kata dari katagori lain.

Dari kesimpulan di atas ternyata bahwa hipotesis pertama menunjukkan kebenarannya dengan dijumpai kesalahan-kesalahan dan perubahan-perubahan dalam pemakaian UUBS seperti telah dibicarakan di atas.

Hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa UUBS sekarang menjadi sederhana tidak dapat dibuktikan sebab pada kenyataannya semua tingkat bahasa dalam UUBS itu masih tetap dipergunakan/dipilih. Akan tetapi, telah ada kecenderungan yang kuat bahwa tingkat-tingkat BHS dan BKS akan ditinggalkan orang dan diganti dengan tingkat BH dan BK. Sedang tingkat BH sendiri memperlihatkan kecenderungan masih sesuai dengan konsep UUBS.

BS dan BP masih belum dapat diduga akan ke mana kecenderungannya sebab masih memperlihatkan pemakaian/pilihan sekitar 50%.

UNDA – USUK BAHASA JAWA

Oleh :

**Tim Peneliti IKIP Sanata Dharma
Yogyakarta**

9. UNDA -USUK BAHASA JAWA

Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan melukiskan *unda-usuk* yang ada di dalam bahasa Jawa. Yang dimaksud dengan *unda-usuk* ialah variasi bahasa yang perbedaan-perbedaannya ditentukan oleh posisi lawan bicara (O_2). Yang diperhatikan di dalam penelitian ini ialah hal-hal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk yang terpakai di dalam *unda-usuk* bahasa Jawa dan bagaimana masing-masing bentuk itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari lukisan yang ada, orang akan mendapatkan gambaran bagaimana suatu bahasa dapat mencerminkan nilai-nilai kebudayaan tertentu dalam masyarakat pemakaiannya; dalam hal ini, perhatian masyarakat Jawa terhadap sopan-santun sangat besar.

Pengumpulan Data

Sebelum penulisan dimulai, suatu pengumpulan data sudah dijalankan. Pengumpulan data dilaksanakan dalam dua cara. Yang pertama, pengumpulan tutur aktual dengan jalan menyadap percakapan-percakapan orang secara tersembunyi. Pengumpulan ini sebetulnya telah dijalankan oleh Dr. Soepomo dan Prof. Wolff. Kami beruntung diperbolehkan mempergunakannya. Tanpa bahan ini, hasil penelitian ini sifatnya terang akan sama sekali berbeda.

Lokasi pengumpulan data, ialah di kota Yogyakarta, Wonosari, Bantul, Sleman, dan desa-desa sekitarnya. Percakapan yang berhasil direkam sangat luas macam ragamnya. Ada peristiwa tutur yang bersifat obrolan belaka, khotbah di mesjid dan di gereja, pidato-pidato, permainan judi, peristiwa kenduri, tawar-menawar di pinggir jalan, di toko, di pasar, pelajaran di se-

kolah, wejangan-wejangan, pertengkaran mulut, orang marah, orang menge-mis, orang mempercakapkan kejelekan orang lain, membujuk, pidato dalam pelayatan, pertunjukan wayang kulit, ketoprak, dagelan, rapat di kantor, percakapan antara pelajar-pelajar sewaktu kelas beristirahat, sewaktu bertemu di jalan, dan lain sebagainya. Peserta percakapan pun berlatar belakang yang bermacam ragam pula, baik dari sudut usia, jabatan, kedudukan sosial, agama, maupun jenis kelaminnya. Semua percakapan yang berjumlah sekitar 150 rol pita kaset ini direkam oleh orang yang biasanya tahu identitas para peserta tutur. Rekaman ini sebagian besar ditranskripsi secara fonemis oleh orang-orang yang merekam, dan hasil transkripsi ini kemudian dapat diolah dengan bermacam-macam teknik.

Data yang kedua, yang berupa kata-kata yang terpakai di dalam *unda-usuk* ini dibuat dari daftar kata susunan Dr. Soepomo. Daftar ini kemudian diteliti dan diperluas dengan memasukkan beberapa kata derivasi yang kiranya pantas dan perlu didaftar.

Pengolahan Bahan

Pengolahan data terutama dijalankan dengan cara membahas materi-materi yang telah terkumpul. Anggauta tim dengan demikian dipaksa merefleksikan bentuk-bentuk dan penggunaan *unda-usuk* yang ada. Hasil bahasan ini harus pula dicek kebenarannya dengan membicarakannya dengan orang lain di luar anggauta tim. Sering kali potongan-potongan rekaman itu dimainkan kembali dan dimintakan penafsiran artinya kepada anggauta tim yang tidak merekam atau kepada orang lain di luar tim.

Adapun daftar kata *ngoko-krama* dan lain-lain dibahas juga benar dan tidaknya; perubahan-perubahan yang ada dan kamus Purwadarminta dipakai sebagai tolak acuan pemeriksaan.

HASIL

1. Bentuk Tingkat Tutur

Di samping menggunakan (1) bentuk pronomina yang berbeda-beda, (2) kata-kata kerja, sifat dan benda berfrekuensi tinggi yang bertingkat-tingkat, (3) ungkapan-ungkapan penyopan, dan (4) bentuk kalimat yang tidak blak-blakan seperti banyak terjadi pada *unda-usuk* bahasa lain, bahasa Jawa juga menggunakan bentuk-bentuk tingkat tutur yang berbeda-beda.

Orang banyak membagi sistem *unda-usuk* ini menjadi dua tingkat tutur: 1) *tingkat ngoko* dan 2) *tingkat basa*. Tingkat basa ini kemudian dibagi pula menjadi dua tingkat, yaitu *tingkat madya* dan *tingkat krama*.

Masing-masing tingkat ini sebetulnya berupa suatu kontinum tingkat tutur. Jadi tingkat *tutur ngoko* dapat berupa *tingkat ngoko* rendah, menengah atau tinggi; tingkat tutur *madya* dapat rendah, menengah, dan tinggi, sedang *tingkat krama* secara teoritis demikian juga. Tetapi sekarang ini buat *tingkat krama* hanya tingkat krama tinggilah yang terdengar. Perpindahan dari tingkat rendah ke menengah, dari menengah ke tinggi sukar, ditentukan batasnya.

Akan tetapi, di sekolah-sekolah buku-buku pelajaran sering mengatakan bahwa tingkat tutur ini dibagi-bagi sebagai berikut:

1. Tingkat Ngoko : (1) Ngoko Lugu
(2) Antya Basa
(3) Basa Antya
2. Tingkat Madya : (1) Madya Ngoko
(2) Madyantara
(3) Madya Krama
3. Krama : (1) Wreda Krama
(2) Kramantara
(3) Muda Krama

Jadi pembagian masing-masing tingkat-tutur ke sub-sub tingkat ini sebetulnya pembagian kasar saja sebab di dalam kenyataannya masing-masing tingkat merupakan suatu kontinum. Dan selanjutnya perlu dicatat bahwa tingkat tutur Wredakrama dan Kramantara dewasa ini hampir tak pernah terdengar.

2. Arti Tingkat Tutur

Tingkat tutur *ngoko* mencerminkan arti tidak perlu ada rasa enggan. Artinya si penutur (O_1) tidak merasa takut-takut, enggan, atau berdistansi terhadap O_2 (orang yang diajak bicara).

Tingkat *krama* mencerminkan rasa sopan dan penuh distansi.

Tingkat *madya* berarti setengah enggan (berdistansi), setengah tidak. Ia menunjukkan rasa sopan tetapi sopannya setengah-setengah saja.

Sesuai dengan tingkat kontinumnya, tingkat *ngoko* dan *madya* yang rendah tidak memancarkan rasa hormat sama sekali, sedang yang menengah memancarkan rasa hormat yang sedang-sedang saja, dan yang tinggi memancarkan rasa hormat yang banyak.

3. Penentuan Tingkat Tutur

Ada dua hal yang sangat penting yang harus diingat pada waktu menentukan tingkat tutur yang akan dipakai. Pertama ialah tingkat formalitas

hubungan perseorangan antara O_1 (si penutur) dan O_2 (lawan bicara), dan yang kedua ialah status sosial yang dimiliki O_2 . Tingkat formalitas ini menentukan pilihan tingkat *ngoko*, *madya*, atau *kromo*, sedangkan tinggi rendah status sosial O_2 menentukan penggunaan kata-kata *krama inggil* yang menunjukkan rasa hormat.

Tingkat formalitas hubungan ditentukan oleh (1) tingkat keakraban hubungan O_1 terhadap O_2 , (2) tingkat keangkeran O_2 , dan (3) umur O_2 . Tingkat status sosial O_2 ditentukan oleh (1) pangkat O_2 di dalam kepegawaian, kemiliteran dan keagamaan, (2) kebangsawanan O_2 , (3) tingkat pendidikan dan keilmuan O_2 , dan (3) tingkat kekayaan O_2 .

4. Kosa Kata

Di dalam sistem unda-usuk bahasa Jawa ada berbagai tingkat kosa kata: *ngoko*, *madya*, *krama*, dan *krama-inggil*. Kosa kata ini antara lain berfungsi menjadi pembentuk tingkat tutur yang terpenting.

Jadi, tingkat tutur itu berbeda dengan vokabuler unda-usuk. Tingkat tutur ialah sistem kode penyampai rasa kesopanan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur vokabuler tertentu, aturan sintaksis tertentu, aturan morfologi dan fonologi tertentu. Sedang vokabuler unda-usuk hanyalah inventarisasi kata-kata yang memiliki arti kesopanan serupa. Secara kebetulan, orang-orang umumnya menamai ketiga tingkat tutur yang ada sesuai dengan nama vokabuler pokok pembentuk tingkat tutur itu.

Vokabuler *ngoko*, pembentuk terpenting tingkat tutur *ngoko*, adalah dasar semua leksikon. Jadi, jumlahnya besar sekali. Setiap konsep yang ada di bahasa Jawa ada bentuk *ngokonya*.

Ada vokabuler *ngoko* khusus yang dinamai *ngoko kasar*, yang dipakai orang pada waktu ia marah atau kesal.

Vokabuler terpenting sesudah *ngoko* ialah *krama*. Jumlahnya cukup banyak. Kata-kata *krama* meliputi jenis kata benda, sifat, kerja, tambahan, dan beberapa kata tugas. Menurut cara kelompok kata *krama*, Yang pertama kata *krama* yang berbentuk sama sekali berbeda dengan kata *ngokonya* dan yang kedua yang memiliki bentuk mirip bentuk *ngokonya*.

Di samping itu, ada bentuk *krama* standar dan bentuk *krama* yang dianggap substandar. Orang-orang kelas rendah sering menggunakan bentuk *krama* substandar. Karena itu, *krama* substandar ini sering dinamai *krama desa*.

Vokabuler tipe ketiga ialah *madya*. Leksikon *madya* ini agak menarik sebab hampir kesemuanya adalah kata-kata yang boleh kita katakan kata tugas. Jumlahnya tidak begitu banyak. Bentuk fonemisnya kebanyakan me-

nyerupai krama, hanya ada beberapa bagian yang tanggal atau diluluhkan.

Vokabuler keempat ialah *krama inggil*. Kata-kata krama inggil ini biasanya adalah kata-kata benda, kerja, atau sifat yang berfrekuensi sangat tinggi. Ada lebih dari 200 kata KI (krama inggil). Sebagian kata yang menunjukkan rasa hormat yang tinggi ini ialah kata *krama andap*, yang caranya menunjukkan rasa hormat ialah dengan jalan merendahkan diri subjek.

5. Pembangkitan Tingkat Tutur

Untuk sekedar memudahkan pemerian, setiap tingkat tutur terdapat tiga jenis vokabuler: (1) vokabuler kata tugas, (2) vokabuler yang berhubungan dengan pronomina O_2 , kata kerja, benda dan sifat milik O_2 , dan (3) kata-kata lain di luar itu. Di dalam skema berikut ini, kata tugas kami letakkan pada kolom pertama, kata-kata untuk O_2 dalam kolom kedua dan kata-kata lain di kolom ketiga. Dengan demikian, gambar skema pembagian tingkat tutur itu, secara berturut-turut dari yang rendah ke yang tinggi, adalah sebagai berikut.

Ngokolugu -----	N	+	N	+	N
Antabasa -----	N	+	KI	+	N
Basaantya -----	N	+	KI	+	K
Madyangoko -----	Md	+	N	+	N
Madyantara -----	Md	+	KI	+	N
Madyakrama -----	Md	+	KI	+	K
Wredakrama -----	N	+	K	+	K (hampir tak ada)
Kramantara -----	K	+	K	+	K (hampir tak ada)
Mudakrama -----	K	+	KI	+	K

Kolom ketiga itu bervariasi. Di antara tingkat tutur yang tertera di atas, ada tingkat tutur antara yaitu yang kata-katanya, pada kolom ketiga dapat terdiri dari campuran ngoko dengan krama. Sebagai pegangan, semakin banyak K maka semakin hormatlah tingkat tutur itu.

6. Alih Tingkat Tutur

Pada waktu berbicara, seorang O_1 sering berpindah tingkat tutur yang ia pakai. Ada dua macam alih tutur yaitu alih tutur permanen dan alih tutur sementara.

Alih tutur permanen terjadi apabila di mata O_1 si lawan bicara telah mengalami perubahan tingkat sosial secara menyolok. Yang sering terjadi

ialah alih kode yang menjadi tingkat tutur rendah. Hal ini disebabkan misalnya O_2 telah menjadi teman baiknya, isterinya, menantunya dan lain sebagainya. Alih tutur ke yang lebih sopan dapat juga, akan tetapi, jumlahnya tidak begitu banyak.

Yang lebih sering terjadi ialah alih kode yang sifatnya sementara. Hal ini dapat disadari atau tidak disadari oleh O_1 . Saat dan terjadinya alih kode sementara ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a) situasi bicara (santai)
- b) tingkat keakraban O_1 terhadap O_2 (akrab),
- c) tingkat kemantapan relasi (belum mantap),
- d) masalah yang dibicarakan,
- e) penguasaan atas tingkat tutur yang dipakai, dan
- f) situasi emosi dan kesadaran O_1 .

Perubahan *istent* (maksud kehendak) yang tiba-tiba terjadi pada diri O_1 pun banyak menyebabkan timbulnya alih tutur.

7. Penunjukan kepada O_3

Penyebutan kepada O_3 (orang lain) tidak mempengaruhi penggunaan tingkat tutur. Tetapi O_3 yang dihormati oleh O_1 harus dinyatakan dengan pemakaian kata-kata KI atau KA (krama andap) pada tindakan, keadaan dan milik yang ada pada O_3 . Orang lain yang tak perlu dihormati, tidak akan mempengaruhi apa-apa pada pemilihan vokabuler yang harus dituturkan.

Kalau dalam menunjuk O_3 ada tindakan-tindakan yang melibatkan O_2 , maka penggunaan KI atau KA itu lalu ada aturan-aturan tertentu yang harus diindahkan agar tutur itu jadi terdengar luwes dan pantas.

8. Interaksi Keadaan Sosial dengan Unda-Usuk

Perubahan-perubahan sosial yang telah terjadi di masyarakat Jawa telah menyebabkan adanya perubahan pada penggunaan tingkat tutur. Dengan semakin terbinanya sistem demokrasi kita, semakin banyaknya fasilitas pendidikan yang ada, semakin tingginya tingkat mobilitas sosial kita, semakin tingginya frekuensi komunikasi tatap muka yang ada, sebagai akibat digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, maka terjadilah gejala-gejala sebagai berikut.

- a. Frekuensi penggunaan tingkat tutur ngoko semakin tinggi.
- b. Kepandaian menggunakan tingkat tutur secara tepat dan kepandaian

menggunakan tingkat tutur sopan secara baik tidak lagi menjadi penanda latar belakang tingkat sosial O_1 .

- c. Kadang-kadang dalam benak ahli bahasa Jawa terdapat keinginan agar terjadi penyederhanaan pada sistem tingkat tutur ini. Keinginan ini tidaklah sekeras apa yang terjadi pada tahun 1916-an, pada waktu gerakan Jawa Dipa yang menghendaki dihapuskannya segala tingkat tutur kecuali tingkat ngoko.

Kesimpulan

Demikianlah pemerian sekedarnya tentang sistem unda-usuk di dalam bahasa Jawa. Masih banyak yang dapat dibicarakan, akan tetapi, berhubung sempitnya waktu dan dana, hal-hal berikut belum dapat dibahas:

- 1) penggunaan istilah sapaan (*terms of address*);
- 2) penggunaan tingkat tutur di berbagai dialek, seperti dialek Banyumas, Bagelen, Tegal, Osing, dan lain-lain;
- 3) sejarah terjadinya tingkat tutur;
- 4) penggunaan tingkat tutur di suatu masyarakat berbahasa Jawa yang khusus, seperti misalnya masyarakat Cina;
- 5) cara penguasaan anak-anak terhadap tingkat tutur yang ekstensif ini;
- 6) dan lain-lain.

Pembahasan bagian-bagian penelitian ini tampak kurang sama mendetailnya. Hal ini disebabkan karena memang dalam satu hal telah diperiksa agak teliti, tetapi dalam hal lain pemeriksaan masih jauh dari sempurna.

Suatu hal yang perlu disampaikan di sini ialah cara membahasnya. Dalam beberapa hal pembahasan ini tampak didaktis sehingga kadang-kadang bernada menggurui. Untuk hal ini kami perlu menyampaikan permohonan maaf. Sebetulnya yang ingin kami sampaikan ialah kejelasan dari persoalannya saja.

Suatu hal yang kiranya dapat segera diteliti ialah jalin-menjalannya sistem unda-usuk ini dengan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat Jawa. Dengan datangnya suasana kebahasaan diglosik yang ada di masyarakat-masyarakat di Indonesia dewasa ini, maka sistem unda-usuk ini telah menjadi semakin rumit.

**BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR
DI SEKOLAH DASAR JAWA TENGAH (SURAKARTA)**

Oleh :

**Tim Peneliti Fakultas Sastra Budaya
UNS Sebelas Maret, Surakarta**

10. BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI SEKOLAH DASAR JAWA TENGAH (SURAKARTA)

Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan gambaran tentang kuantitas dan kualitas pemakaian bahasa Indonesia (BI) sebagai bahasa pengantar.
2. Mendapatkan gambaran tentang ketepatangunaan pemakaian BI sebagai bahasa pengantar, meliputi:
 - 1) gambaran manfaat pemakaian BI sebagai bahasa pengantar;
 - 2) gambaran kesulitan dalam pemakaian BI sebagai bahasa pengantar;
 - 3) gambaran kosa kata yang dikuasai secara memadai oleh siswa;
 - 4) gambaran kosa kata yang dikuasai secara kurang memadai oleh siswa; dan
 - 5) gambaran kosa kata yang dikuasai secara tidak memadai oleh siswa.
3. Mendapatkan gambaran tentang tindak lanjut yang perlu diambil dalam hal kebijaksanaan pemakaian BI sebagai bahasa pengantar.

Hasil yang Diharapkan:

1. Data deskriptif tentang banyaknya dan mutu pemakaian BI sebagai bahasa pengantar.
2. Data deskriptif tentang ketepatangunaan BI sebagai bahasa pengantar, meliputi:
 - 1) data deskriptif tentang manfaat pemakaian BI sebagai bahasa pengantar;
 - 2) data deskriptif tentang kesulitan dalam pemakaian BI sebagai bahasa pengantar;

- 3) data deskriptif tentang kosa kata yang dikuasai secara memadai oleh siswa;
 - 4) data deskriptif tentang kosa kata yang dikuasai secara kurang memadai oleh siswa;
 - 5) data deskriptif tentang kosa kata yang dikuasai secara tidak memadai oleh siswa.
3. Data deskriptif yang menunjang tindak lanjut yang perlu diambil dalam hal kebijaksanaan pemakaian BI sebagai bahasa pengantar.

Beroperasinya penelitian adalah sebagai berikut.

1. Penelitian beroperasi dari awal Agustus 1976 sampai pertengahan Maret 1977.
2. Penelitian dilakukan di eks-Karesidenan Surakarta yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten/kodya.
Tiap kabupaten diambil 3 kecamatan (maju, madia, dan sedang berkembang, atau kota, pinggiran kota, dan desa).
Tiap kecamatan diambil: satu SD maju, satu SD madia, dan satu SD sedang berkembang.
Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, sedangkan kepada murid kelas IV dan V (sekitar 10%) dijalankan observasi dan kuesioner.
3. Penelitian menggunakan enam macam instrumen untuk empat macam metode.
Kosa kata diteskan kepada masing-masing 10 orang murid SD madia kelas IV dan V yang terdapat di kecamatan dalam setiap kabupaten/kodya.
 - 1) Instrumen pertama (Formulir I) adalah metode observasi, untuk mengetahui situasi interaksi belajar-mengajar.
 - 2) Instrumen kedua (Formulir IIA) untuk metode wawancara, ditujukan kepada murid.
 - 3) Instrumen ketiga (Formulir IIB) untuk metode wawancara, ditujukan kepada guru/kepala sekolah.
 - 4) Instrumen keempat (Formulir IIC) untuk metode wawancara, ditujukan kepada pejabat-pejabat kantor Kecamatan Departemen P dan K.
 - 5) Instrumen kelima (Formulir III) untuk metode kuesioner, ditujukan kepada orang tua murid.
 - 6) Instrumen keenam berupa daftar kosa kata, untuk diteskan kepada sejumlah unit tertentu. Daftar kosa kata terdiri dari 1.000 kata yang dipakai dalam empat macam buku pelajaran (Bahasa Indone-

sia, IPA, IPS, dan Matematika) yang paling banyak digunakan. Keseribu kata itu terbagi ke dalam 5 kelompok a 200 kata.

Instrumen-instrumen, metode, dan responden tersebut dapat diskemakan sebagai berikut. Selanjutnya penyebaran instrumen pada daerah masing-masing.

TABEL 1
PENYEBARAN INSTRUMEN I

Metode	Situasi Bentuk 1	Murid Bentuk 2A	Guru Bentuk 2B	Pejabat Bentuk 2C	OTM Bentuk 3	140 Murid Kosa kata
(1) Obser- vasi	124					
(2) Wawan- cara		499	412	58		
(3) Kuesio- ner					476	
(4) Tes						5 kelompok a' 200 (= 1000)

TABEL 2
PENYEBARAN INSTRUMEN II

Instr. Daerah	Bentuk 1	Bentuk 2A	Bentuk 2B	Bentuk 2C	Bentuk 3	Kosa kata
Kodya Ska.	18	81	58	15	81	5 kelompok (1.000)
Kab. Skh.	18	63	78	7	67	5 kelompok (1.000)
Kab. Klt.	16	69	56	7	49	5 kelompok (1.000)
Kab. Byli.	18	97	57	7	101	5 kelompok (1.000)
Kab. Kra.	18	65	47	6	65	5 kelompok (1.000)
Kab. Srg.	18	59	55	7	48	5 kelompok (1.000)
Kab. Wmri.	18	65	61	9	65	5 kelompok (1.000)

4.4 Penelitian dilakukan oleh delapan orang petugas.

Sesudah data dikumpulkan, data itu diolah dengan ditabulasikan, maka tersusunlah data deskriptif seperti yang diharapkan sebagai hasil penelitian, berupa tabel-tabel dan daftar.

Dari tabel-tabel dan daftar yang dihasilkan itu dapat disimpulkan *kesan dan saran* sebagai berikut:

1. Kesan

1.1 Penggunaan BI sebagai Bahasa Pengantar

1) Oleh murid

Penggunaan BI oleh murid cukup banyak dilakukan. Ini dinyatakan oleh peneliti, guru, dan orang tua murid. Namun, lewat keterangan lain penggunaan yang banyak itu ternyata masih terbatas pada penggunaan di dalam kelas. Ini dibuktikan oleh sedikitnya penggunaan BI oleh murid dalam kegiatan lain dan dalam lingkungan sekolah. Begitu pula penggunaan BI oleh unit di rumah dan di masyarakat lebih sedikit lagi. Selanjutnya mutu penggunaan BI oleh murid dapat dinyatakan sebagai berikut. Lebih dari setengahnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Hampir seluruhnya menghayati interaksi belajar-mengajar dengan BI dalam kegembiraan. Keberanian bertanya dan berpendapat cukup tinggi. Murid-murid cenderung membuat dengan satu kata terutama dalam menjawab pertanyaan. Namun, tiga perempat dari mereka dinilai memiliki daya penerimaan yang cukup. Lebih dari empat perlima, mereka menyatakan berkemampuan lisan dan tulis elementer. Tetapi kurang dari setengahnya yang telah memiliki hubungan emosional dalam arti positif. Dalam interaksi belajar-mengajar terdapat sedikit kesan bahwa BI murid diglosiastik; hal ini umumnya motivasi bersopan-santun.

2) Oleh guru

Sehubungan dengan penggunaan BI sebagai bahasa pengantar, kedudukan guru dan murid adalah sebagai komponen penentu. Keduanya merupakan faktor penentu yang langsung dalam penggunaan BI dalam fungsinya itu, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Sikap positif guru terhadap BI sudah disebutkan di atas, umumnya baik. Boleh dikatakan seluruhnya selalu menggunakan BI sebagai bahasa pengantar. Namun, lebih dari tiga perlimanya hanya dinilai dalam mutu cukup dalam penggunaannya. Mungkin ini disebabkan

oleh sifat penggunaan yang sedikit diglosiastik (lebih dari dua perlimanya). Mungkin keadaan ini akan berlangsung cukup lama sebab motivasi mereka umumnya untuk menjelaskan. Sebab lainnya mungkin sifat penggunaan yang sedikit bilingualistik (kira-kira meliputi sepertiganya). Sifat bilingualistik ini umumnya menyusup dalam level-level fonologis dan sintaksis. Dengan sikap ber-BI yang ditingkatkan seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Yang jelas wawancara dengan seluruh guru/kepala sekolah, juga memberi data bahwa lebih dari setengahnya mereka menyatakan menggunakan bahasa campuran sebagai bahasa pengantar.

3) Oleh pejabat Kantor Kecamatan

Pejabat-pejabat berkedudukan sebagai faktor lingkungan (*environmental input*), dalam penggunaan BI sebagai bahasa pengantar. Penggunaan oleh mereka secara luas dan baik akan berpengaruh baik pula terhadap hal yang terakhir ini. Tidak seluruh pemerintah dinas menggunakan BI (\pm baru sembilan persepuluh). Kurang dari setengahnya mereka ber-BI dalam percakapan dengan sejawat.

1.2 Ketepatangunaan BI sebagai Bahasa Pengantar

1) Faedah

Tentang faedah BI sebagai bahasa pengantar, didapatkan data yang menunjukkan mantapnya BI sebagai bahasa pengantar. Pada umumnya para pejabat berpendapat bahwa penggunaan BI sebagai bahasa pengantar cukup lancar.

2) Kesulitan

Namun, didapat pula data bahwa kesulitan terdapat dalam pemahaman gagasan, pemahaman kalimat, dan pemahaman kata-kata. Menurut pendapat murid yang dikuatkan oleh pendapat pejabat dan pendapat orang tua murid, kesulitan itu terutama terletak dalam pemahaman kata-kata. Dalam hubungannya dengan kesulitan pemahaman kata-kata ini, telah diteliti tingkat penguasaan terhadap kata-kata yaitu 1.000 kata dari buku-buku pelajaran yang banyak dipakai. Tingkat penguasaan ini telah dikategorikan menjadi tiga tingkatan : *memadai*, *kurang memadai*, dan *tidak memadai*. Dimaksudkan sebagai pertimbangan: prefensi di dalam pemakaian, mana-mana yang perlu diremidiasi, dan mana-mana yang perlu diulangi mengajarkannya. Juga layak dicatat bahwa secara umum prosentase penguasaan kata oleh anak kota lebih tinggi daripada anak pinggiran kota, pro-

sentase penguasaan kata oleh anak kelas V lebih tinggi daripada anak kelas IV. Walaupun demikian, perbedaan yang terakhir ini tidak begitu besar.

1.3 Dasar-dasar Pengambilan Kebijakan

Untuk tindak lanjut bagi perbaikan kedudukan BI sebagai bahasa pengantar, perlu ditentukan dasar-dasarnya dari berbagai pendapat. Baik guru maupun pejabat umumnya setuju bila BI digunakan sebagai bahasa pengantar sejak kelas I. Namun, untuk pejabat, sesudah menyatakan bahwa sekarang pada umumnya penggunaan BI sebagai bahasa pengantar sejak kelas III, lebih kurang dua pertiga dari mereka menilai keadaan terakhir ini tepat.

Sedang orang tua siswa memberikan pendapat yang sama kuat bagi dimulainya penggunaan BI sebagai bahasa pengantar sejak kelas I atau sejak kelas III.

Sikap ragu dari pejabat dan orang tua murid ini cukup memberi implikasi bahwa langkah perbaikan lebih lanjut perlu dilakukan secara cermat. Selanjutnya, tentang kedudukan bahasa Jawa berhubung dipakainya BI sebagai bahasa pengantar. Lebih dari 50% pejabat berpendapat bahwa bahasa Jawa tidak perlu terdesak.

2 Saran

Berdasarkan kesan umum dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

2.1 Penggunaan BI sebagai Bahasa Pengantar

Keadaan ideal yang dituju ialah bahwa BI dipakai sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ini sesuai dengan hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional. Sebagai bahasa pengantar di SD, jelas bahwa akhirnya BI perlu digunakan sejak kelas I.

2.2 Menuju kepada keadaan itu, perlu segera dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengajaran dan penggunaan BI. Pengajaran BI diberikan sejak kelas I; ini telah sesuai dengan pelaksanaan kurikulum 1975. Murid hendaklah selalu ber-BI di lingkungan sekolah. Dan guru bersikap positif terhadap BI. Pada giliran selanjutnya pejabat-pejabat P dan K pun harus demikian. Bahkan karena hambatan dikirakan terletak dalam kebudayaan, perbaikan hendaknya dari atas. Dan kiranya amat tepat bila dihubungkan dengan konduite.

2.3 Untuk menghindari ekses psikologis yang mungkin timbul, intensifikasi pengajaran bahasa Jawa perlu dilaksanakan serempak, terutama pengadaan sarana seperti buku-buku dan sebagainya.

2.4 Dengan melalui suatu eksperimen, penggunaan BI sebagai bahasa pengantar hendaknya diluaskan sejak kelas II. Dan lewat eksperimen berikut penggunaan BI sebagai bahasa pengantar diluaskan lagi sejak kelas I. Urutan peralihan ini hendaklah dilakukan mulai dari daerah kota, daerah pinggiran kota, dan akhirnya daerah pedesaan.

2.5 Kategorisasi tingkat penguasaan kata, menjadi: *memadai*, *kurang memadai*, dan *tidak memadai*, hendaklah dimanfaatkan sebagai berikut.

Tingkat penguasaan memadai bisa menjadi petunjuk preferensi pemakaiannya secara langsung di kelas IV/V, baik lisan maupun tertulis. Tingkat penguasaan kurang memadai menjadi petunjuk perlunya remediasi. Dan tingkat penguasaan tidak memadai menjadi petunjuk perlunya diajarkan lagi.

Tingkatan penguasaan kata *memadai* yaitu tingkatan penguasaan oleh 75%–100% murid. Tingkatan penguasaan kata *kurang memadai* yaitu tingkatan penguasaan oleh 61%–74% murid. Tingkatan penguasaan *tidak memadai* yaitu tingkatan penguasaan oleh 0%–60% murid.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DI JAWA TIMUR

Oleh :

**Tim Peneliti Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia
FKSS – IKIP Malang**

11. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DI JAWA TIMUR

1. Tujuan Penelitian

Penelitian Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia (BI) di Jawa Timur (Sebuah Studi Deskriptif tentang Fungsi BI dalam Kedudukannya sebagai Bahasa Negara dalam Domain Pemerintahan Desa di Jawa Timur) ini bertujuan memperoleh deskripsi sosiolinguistik tentang frekuensi pemakaian BI dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur dengan memperhatikan variabel-variabel: topik, situasi, lokasi, dan partisipan.

Dalam deskripsi ini secara implisit akan tergambar pula:

- 1.1 perbedaan frekwentatif pemakaian BI antara berbagai daerah sampel di Jawa Timur; dan
- 1.2 perbedaan frekwentatif pemakaian BI antara desa-desa; urban, rurban, dan rural, di tiap daerah sampel.

2. Hipotesis

Keseluruhan kegiatan penelitian ini diarahkan dengan hipotesis kerja sebagai berikut: "Dalam domain pemerintahan desa, para pemimpin formal desa dari desa-desa daerah Jawa Timur, sebagai pembicara pertama, menggunakan BI secara lisan, baik kepada sesama pemimpin formal desa maupun kepada penduduk biasa."

3. Pengertian Konsep Pokok/Istilah dan Pembatasan Masalah

3.1 Kedudukan BI

Yang dimaksud kedudukan BI adalah status relatif BI sebagai sistem lambang nilai budaya Indonesia, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial Indonesia yang dihubungkan dengan BI.

Dari dua macam kedudukannya, yaitu sebagai *bahasa nasional* dan sebagai *bahasa negara*, hanya kedudukannya yang kedualah yang diambil menjadi pangkal tolak penelitian ini.

3.2 Fungsi BI

Yang dimaksud fungsi BI adalah nilai pemakaian BI yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian BI dalam kedudukan yang diberikan kepadanya.

Dari empat macam fungsinya, yaitu sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (4) bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta teknologi modern; hanya fungsinya yang ketigalah yang menjadi sasaran penelitian ini.

3.3 Domain Pemerintahan Desa

Yang dimaksud domain pemerintahan adalah *The 'governmental administration' domain*, yang dirumuskan sebagai . . . *a social nexus which brings people together primarily for a certain cluster of purpose.*

Desa adalah "masyarakat pada unit pemerintahan terendah."

3.4 Pemimpin Formal Desa (PFD)

Yang dimaksud pemimpin formal desa adalah pemimpin tingkat desa yang memperoleh kekuasaannya karena dipilih oleh rakyat desa dan atau pejabat di atasnya pada tingkat desa.

4. Populasi, Sampel dan Data

4.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua PFD dari desa-desa di daerah Jawa Timur.

4.2 Sampel

Penentuan responden sebagai sumber data dilakukan secara bertahap. Pemilihan daerah sampel dilakukan secara berturut-turut dari daerah tingkat II — daerah tingkat desa.

Untuk menetapkan daerah sampel pada dasarnya dipergunakan teknik acak-berlapis (*stratified random sampling*), kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Untuk kasus-kasus tertentu dipergunakan teknik *purposif*), sedangkan untuk responden-responden yang sudah dianggap homogen dipergunakan teknis acak-kebetulan (*random accidental*).

(1) Daerah tingkat II sumber sampel ditentukan berdasarkan asumsi multilingualisme bahwa di daerah Jawa Timur terdapat tiga macam tipe, yaitu: (a) tipe "multi-lingual", (b) tipe "tri-lingual", dan (c) tipe "bi-lingual". Oleh karena itu, dari 38 (tiga puluh delapan) daerah tingkat II di Jawa Timur diambil 6 (enam) daerah tingkat II ($\frac{6}{38} \times 100\% = 15,8\%$), yaitu Kodya Surabaya, Kabupaten Gresik; kota Jember, Kabupaten Jember; Kodya Madiun, dan Kabupaten Madiun.

(2) Daerah tingkat kecamatan sumber sampel ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa harus diperoleh jenis-jenis desa: urban, rurban, dan rural, serta pertimbangan prosedur perizinan, maka dari 75 (tujuh puluh lima) buah kecamatan dipilih 7 (tujuh) buah ($\frac{7}{75} \times 100\% = 9,3\%$), yaitu:

Kecamatan Tambaksari (dalam kota) dan Wonocolo (pinggiran) di Surabaya; Kecamatan Kedamean (luar kota) di Gresik; Kecamatan Kaliwates (dalam kota) dan Mayang (luar kota) di Jember; Kecamatan Kota Madiun (dalam kota) dan Jiwan (luar kota) di Madiun.

(3) Daerah tingkat desa sumber sampel ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa setiap daerah tingkat II, daerah tingkat kecamatan, dan setiap jenis desa sumber sampel perlu diwakili, maka dari:

- (a) 19 (sembilan belas) desa urban dari Surabaya, Jember, dan Madiun, diambil secara random, masing-masing sebuah;
- (b) 26 (dua puluh enam) desa rurban dari Surabaya, Jember, dan Madiun, diambil secara random, masing-masing sebuah;
- (c) 50 (lima puluh) desa rural dari Gresik, Jember, dan Madiun, diambil secara random, masing-masing sebuah.

Jadi, daerah tingkat desa sumber sampel di 3 (tiga) daerah tingkat II seluruhnya ada 9 (sembilan) desa, dengan perincian sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) desa urban,
- b) 3 (tiga) desa rurban, dan
- c) 3 (tiga) desa rural.

(4) Responden sebagai sumber data untuk seluruh daerah ditetapkan sebanyak $7,5\% = \frac{15}{200} \times 1589$ orang PFD = 120 (seratus dua puluh) orang PFD. Jadi, setiap daerah berjumlah 40 (empat puluh) orang yang masing-masing terperinci atas:

- (a) 25 (dua puluh lima) orang untuk desa urban;
- (b) 8 (delapan) orang untuk desa rurban; dan
- (c) 7 (tujuh) orang untuk desa rural.

4.3 Data

Data penelitian ini ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- (1) data dasar, yaitu data yang berupa informasi-informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan penjelasan lisan dari inform pangkal tentang situasi umum desa sumber sampel (jumlah penduduk, komposisi etnis, tingkat perekonomian, tingkat pendidikan, latar belakang, dan sebagainya). Data dasar ini dapat dipergunakan sebagai pembantu dalam strategi penelitian maupun dalam analisis data utama;
- (2) data utama, yaitu data kuantitatif yang berupa jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti tentang pemakaian bahasa secara lisan dalam domain pemerintahan desa; dan
- (3) data tambahan, yaitu data kualitatif yang berupa catatan-catatan peneliti, hasil-hasil pengamatan yang tidak sistematis selama peneliti berada di lapangan. Data ini dapat dipergunakan sebagai pembantu menafsir hasil penelitian.

5. Pengumpulan Data

5.1 Teknik Pengumpulan

Data-data dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- (1) data dasar dikumpulkan dengan instrumen yang berbentuk angket dan wawancara sambil lalu;
- (2) data utama dikumpulkan dengan teknik wawancara berencana dan bentuk pertanyaan tertutup; dan
- (3) data tambahan dikumpulkan dengan teknik pengamatan dan wawancara tidak sistematis.

5.2 Instrumen

Penelitian ini menggunakan dua macam instrumen, yaitu:

- (1) instrumen data dasar yang dipergunakan untuk menggali data dasar. Instrumen ini berbentuk angket;
- (2) instrumen data utama yang dipergunakan untuk menggali data utama. Instrumen ini berbentuk Daftar Pertanyaan (DP) tertutup yang terdiri atas tiga perangkat DP, yaitu DP untuk pamong desa, DP untuk pim-

pinan RK (RW)/RT, dan DP untuk pengurus LSD. Ketiga perangkat DP tersebut secara lahiriah berbeda, tetapi isinya sama dalam arti bahwa jenis kegiatan, lokasi, jenis topik yang dipersoalkan, dan jenis partisipan adalah seragam. Satu-satunya perbedaan terletak pada *pe*-nyebaran topik dalam jenis kegiatan tertentu.

6. Pengolahan Data

6.1 Penyajian Data

Data utama yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut.

(1) Lembar Himpunan Kode Data (disingkat LHKD)

Kode jawaban pada instrumen dipindahkan ke dalam LHKD. Pemin-dahan kode data itu dilakukan secara urut menurut jenis desa dari daerah Surabaya/Gresik, Jember, dan Madiun. Jumlah kumulatif dari ketiga daerah itu merupakan data untuk seluruh Jawa Timur.

(2) Turus (*Tally*)

Data yang terhimpun dalam LHKD dikelompok-kelompokkan berda-sarkan:

- (a) identitas/karakteristik responden;
- (b) sumber perolehan bahasa; dan
- (c) pemakaian bahasa dalam topik kedinasan.

Hasil penghitungan ini dimasukkan ke dalam daftar yang disebut *turus*.

6.2 Pengolahan Data

Data yang tersimpan dalam Turus tidak seluruhnya diolah, melainkan hanya satu saja yaitu kategori data utama yang ketiga (Pemakaian bahasa dalam topik kedinasan) yang tentu saja dikorelasikan dengan *identitas res*-*ponden*, khususnya butir nomor 6 yaitu PFD. Untuk memudahkan peng-olahan, maka *korelasi* antara PFD dan pemakaian bahasa perlu dimasukkan ke dalam tabel-tabel karena tabel memang merupakan alat peringkas untuk menyajikan data asli yang telah terorganisir.

Pentabulasian itu dilakukan mengikuti langkah-langkah penyusunan Turus serta dengan memperhitungkan variabel-variabel:

- (1) pembicaraa (01) = PFD
- (2) domain = pemerintahan desa
- (3) topik = kedinasan
- (4) situasi = resmi,

maka diperoleh tabel tentang frekuensi pemakaian bahasa (selanjutnya di-singkat TFPB).

Untuk mengolah data lebih lanjut, dari TFPB tersebut di atas, disusun tabel perbandingan prosentase frekuensi pemakaian bahasa (selanjutnya disingkat (TPP) antara berbagai jenis desa, dan antara berbagai daerah dengan memusatkan salah satu variabel pembeda.

6.3 Analisis Data

TPP sejumlah dua belas disusun berdasarkan pemusatan pokok masalah yang akan dianalisis. Tiga pokok masalah yang dianalisis adalah:

- (1) tentang pemakaian BI dalam rapat;
- (2) tentang pemakaian BI dalam pelayanan; dan
- (3) tentang pemakaian BI dalam perjumpaan.

Dengan berbagai variabel tetap yang tercantum dalam TPP dan variabel penentu pemilihan bahasa, maka ketiga pokok masalah itu di atas berturut-turut dianalisis daerah demi daerah (Surabaya, Jember, Madiun), kemudian jenis desa demi jenis desa (urban, rurban, rural) di Jawa Timur.

7. Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini (cf. nomor 1) dan hasil analisis diperoleh kesimpulan atau hasil penelitian sebagai berikut:

7.1 Hasil Kuantitatif

Hasil kuantitatif ialah hasil yang dinyatakan dalam bentuk angka yang menyatakan prosentase frekuensi pemakaian BI secara lisan oleh para PFD dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur. Hasil itu dapat dilihat pada tabel berikut.

- (1) Prosentase frekuensi pemakaian BI dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur

Jenis kegiatan	Lokasi	Partisipan		Prosentase frekuensi pemakaian BI			
		Jenis	Juml.	Surabaya	Jember	Madiun	Jawa Timur
Rapat	Kantor	PFD	n	62,5	65	77,5	68,4
		PFD+P	n	35	25	35	31,7
Pelayanan	Kantor	P	2	25	17,5	7,5	16,7
		P	1	4,2	8,4	8,3	6,9
Perintah	Rumah	P	1	15	5	5	8,3
Perjumpaan	Kantor	PFD	1	35	20	57,5	37,5
	Jalan	PFD	1	30	20	52,5	34,2
		P	1	17,5	7,5	5	10

- (2) Perbandingan frekuensi pemakaian BI dalam domain kedinasan di ketiga jenis desa di Jawa Timur.

TABEL 1
PERBANDINGAN FREKUENSI PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA
DI KETIGA JENIS DESA DI JAWA TIMUR

Jenis Desa	Prosentase frekuensi pemakaian BI			
	Surabaya	Jember	Madiun	Jawa Timur
Urban	35,3	29,7	43,7	36,2
Rurban	29,7	9,4	18,75	19,3
Rural	0	3,6	0	1,2

- (3) Dengan mengabaikan X dan Tb pada TFPD I, II, III, IV, dan memperhitungkan secara vertikal dan menyeluruh, maka prosentase rata-rata frekuensi pemakaian bahasa dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur oleh para PFD dapat ditabelkan sebagai berikut:

TABEL 2
PROSENTASE FREKUENSI PEMAKAIAN BAHASA
DALAM DOMAIN PEMERINTAHAN DESA DI JAWA TIMUR

Daerah	Prosentase frekuensi pemakaian bahasa						
	BI	BJ	BM	BI+BJ	BI+BM	BJ+BM	BI+BJ+BM
Surabaya	28	19,2	—	29,4	—	—	—
Jember	19,8	19,6	20,8	1,3	2,8	0,3	2,5
Madiun	29,8	28,2	—	25,5	—	—	—
Jawa Timur	26,7	22,4	7	19,6	0,9	0,1	0,8

adalah: (1) kurangnya waktu pelaksanaan penelitian, (2) droping dana yang terlambat, (3) prosedur perizinan yang makan waktu cukup lama. Izin ditsus propinsi baru keluar tanggal 5 November, sedang izin ditsus daerah tingkat II sasaran penelitian rata-rata makan waktu satu minggu. Hambatan teknis akademis berupa: (1) kurangnya pengalaman tenaga peneliti di bidang sosiolinguistik, (2) kurangnya sumber pustaka yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Akibat ketergesa-gesaan pelaksanaan penelitian, kekurangmampuan tenaga peneliti dan keterbatasan sumber pustaka, hasil penelitian ini barangkali belum bermutu.

7.2 Hasil Kualitatif

Hasil kualitatif ialah hasil yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atau hasil interpretasi terhadap berbagai data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif.

Dari hasil kualitatif dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Hipotesis yang berbunyi "Dalam domain pemerintahan desa, para PFD dari desa-desa daerah Jawa Timur sebagai pembicara pertama (01) mempergunakan BI secara lisan, baik kepada sesama PFD maupun kepada penduduk biasa (P)" ternyata tidak terbukti kebenarannya;

- (2) Akibat tidak terbuktinya hipotesis di atas ialah bahwa dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi BI belum berfungsi;
- (3) Belum berfungsinya BI dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur disebabkan oleh belum mempunyai P ber-BI, lebih-lebih di daerah rural;
- (4) Akibat belum mempunya ber-BI sebagian besar P dan sebagian kecil PFD, maka asumsi yang berbunyi "Penduduk desa-desa di daerah Jawa Timur sekurang-kurangnya telah menguasai dua macam bahasa, yaitu BI dan BD setempat" tidak berlaku sepenuhnya. Tingkat berlakunya asumsi itu secara berturut-turut dari berlaku - kurang berlaku - tidak berlaku, ialah berturut-turut urban - rurban - rural.

8. Pengalaman Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian ini mengalami dua hambatan yang bersifat *nonteknis akademis* dan *teknis akademis*. Hambatan nonteknis akademis itu

9. Saran-saran

Agar penelitian yang akan datang memperoleh hasil yang lebih baik, dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

- 9.1 Untuk mengetahui secara lengkap tentang fungsi BI dalam domain pemerintahan, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran, yaitu dalam domain pemerintahan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau tingkat kotamadya.
- 9.2 Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan BI secara menyeluruh perlu dilaksanakan penelitian lanjutan yang meliputi berbagai domain, misalnya: domain sosial budaya, domain perekonomian, dan domain keluarga

**BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR
DI SEKOLAH DASAR JAWA TIMUR/MADURA**

Oleh :

**Tim Peneliti Departemen Bahasa Sastra Indonesia
FKSS – IKIP Malang**

12. BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI SEKOLAH DASAR JAWA TIMUR/MADURA

Laporan ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama memuat tiga bab yaitu bab 1 tentang latar belakang masalah; bab 2 tentang pengumpulan data, dan bab 3 tentang prosedur analisis data.

Bagian kedua memuat lampiran-lampiran yang terdiri dari proposal, disain, laporan *try-out* instrumen sementara, observasi, kuesioner, dan wawancara. Kemudian menyusul instrumen yang direvisi, daftar peneliti, SD sampel, daftar urutan tugas, daftar murid, rekapitulasi tabulasi data observasi, kuesioner dan wawancara.

Di dalam disain dijelaskan latar belakang masalah, judul penelitian, tujuan penelitian, beberapa hipotesis, ketentuan istilah-istilah yang dipakai dan arti singkatan-singkatan, hasil yang diharapkan, metode, teknik kerja, populasi, dan sampel.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang frekuensi dan intensitas pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar lisan oleh guru dalam proses mengajar di sekolah-sekolah dasar di Jawa Timur/Madura.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka judulnya juga dibatasi.

Di dalam bab tentang latar belakang masalah dijelaskan selain asal mula penelitian ini juga pembatasan judul penelitian karena judul yang diberikan mencakup bidang penelitian yang luas. Dalam penelitian pendahuluan ini kami hanya membatasi diri pada satu aspek pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, yaitu aspek pemakaian bahasa

Indonesia sebagai bahasa pengantar lisan oleh guru dalam situasi belajar dan mengajar di Sekolah-sekolah dasar Jawa Timur/Madura.

Oleh karena di Jawa Timur/Madura ini ribuan SD, tidak mungkin di dalam waktu yang begitu terbatas dengan tenaga lima orang dan dana yang juga terbatas dapat meneliti semua SD ini. Untuk penelitian ini hanya diambil tiga daerah sampel, yaitu kotamadya Malang, kotamadya Kediri, dan Kabupaten Pamekasan. Kotamadya Malang dapat mewakili daerah BI yang dipengaruhi bahasa Jawa dan bahasa Madura; Kotamadya Kediri dapat mewakili daerah BI yang dipengaruhi oleh bahasa Jawa; sedangkan Kabupaten Pamekasan dapat mewakili daerah BI yang dipengaruhi bahasa Madura. Tidak semua SD di ketiga tempat ini diteliti. Yang dipilih secara random hanya 5% dari seluruh SD dari ketiga tempat ini. Seluruhnya berjumlah 33 SD. sekolah-sekolah dasar ini dibagi menurut stratifikasi SD desa, SD pinggiran, dan SD kota. Semula stratifikasi SD ini didasarkan atas homogenitas masyarakat sekitarnya. Tim berpendapat bahwa masyarakat yang homogen akan lebih banyak memakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar daripada masyarakat yang heterogen. Tetapi setelah sampai di lapangan, para peneliti mendapat kesulitan untuk menentukan SD pinggiran berdasarkan asumsi di atas. Kesulitannya adalah tidak cukup waktu untuk meneliti dan menentukan homogenitas daerah "pinggiran" itu karena waktu penelitian itu sendiri dibatasi oleh kepala kantor P dan K setempat. Sebab itu stratifikasi pinggiran itu terpaksa disesuaikan dengan stratifikasi yang diadakan oleh P dan K. setempat.

Tidak semua kelas menjadi objek penelitian. Yang diteliti hanya kelas IV dan kelas VI. Alasannya karena ada dua jenis SD. Yang satu memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak dari kelas I, sedangkan SD yang lain baru belajar bahasa Indonesia di kelas III dan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas IV. Jadi kelas IV dapat menggambarkan perbandingan intensitas dan frekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kedua sekolah dasar tersebut. Kelas VI dapat menggambarkan perbedaan hasil terakhir dari intensitas dan frekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kedua jenis SD.

Mata pelajaran yang diobservasi adalah pelajaran bahasa Indonesia dan salah satu dari pelajaran bukan bahasa Indonesia.

Demi kejelasan pengertian maka di dalam desain juga ditentukan pengertian istilah.

Sebagai dasar penelitian ini dipakai enam buah hipotesis sebagai

berikut:

1. Frekuensi pemakaian bahasa pengantar—bahasa Indonesia (BP—BI) oleh guru di sesuatu SD semakin besar, semakin dekat SD itu ke pusat kota.
2. Frekuensi pemakaian BP-BI semakin besar, semakin lama BI itu dipakai.
3. Frekuensi pemakaian BP-BI untuk pelajaran BI lebih besar daripada pelajaran bukan bahasa Indonesia (NBI).
4. Intensitas pemakaian BP-BI semakin tinggi, semakin dekat SD itu ke pusat kota.
5. Intensitas pemakaian BP-BI semakin tinggi, semakin lama BI itu dipakai.
6. Intensitas pemakaian BP-BI untuk pelajaran BI lebih tinggi daripada pelajaran NBI.

Berdasarkan hipotesis-hipotesis ini dan beberapa literatur disusun instrumen sementara. Ada tiga macam instrumen: instrumen observasi, instrumen kuesioner, dan instrumen wawancara, sesuai dengan metode deskriptif yang memakai teknik observasi, kuesioner, dan wawancara.

Sebelum turun ke lapangan instrumen sementara itu dicobakan dahulu kepada tiga macam sekolah di Malang, yaitu (1) SD kota (Klojen Lor III); (2) SD pinggiran (SD Sumber Sari); dan (3) SD desa (SD Buring II).

Hasil dari percobaan instrumen yang tiga ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu yang direncanakan untuk tiap-tiap instrumen terlalu lama.
2. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam kuesioner tidak perlu ditanyakan kembali dalam wawancara.
3. Pertanyaan-pertanyaan harus direvisi isi dan susunannya.
4. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan perlu diperbaiki redaksinya.
5. Guru kelas yang telah diminta mengisi kuesioner tidak perlu diwawancarai lagi. Cukup kepada sekolah saja yang diwawancarai.

Berdasarkan hasil percobaan ini maka ketiga instrumen itu diperbaiki isi dan susunannya, sedangkan redaksinya diusahakan se jelas mungkin.

Isi dan penyusunan instrumen ini didasarkan pada literatur atau bacaan-bacaan yang sebelumnya telah dipelajari.

Jauh sebelum turun ke lapangan kantor-kantor P dan K setempat sudah disurati untuk minta izin melakukan penelitian di daerah mereka. Jawaban yang pasti baru datang pada akhir Oktober dan penelitian itu harus dilakukan dalam bulan November, yaitu pada tanggal 3–11 November di Kediri, 11–18 November di Pamekasan, dan tanggal 22–24 November di Kotamadya Malang.

Untuk pengumpulan data ini dibentuk dua kelompok. Kelompok satu terdiri dari Sekretaris Tim, Drs. Soedjatno yang bertindak sebagai ketua

kelompok dan seorang anggota Tim Drs. Imam Syafi'ie. Kelompok kedua terdiri dari anggota Tim Drs. R. Umar Wirasno yang bertindak sebagai ketua kelompok dibantu oleh Drs. A. Sjukur Ghazali. Kelompok I bertugas di Kotamadya Kediri, sedangkan kelompok kedua bertugas di Kabupaten Pamekasan di Madura. Penelitian di Malang dilaksanakan oleh kedua kelompok bersama-sama. Sebelumnya sudah diadakan orientasi.

Sebelum berangkat ke tempat penelitian masing-masing kelompok dibekali dengan bahan-bahan instrumen yang diperlukan, surat pengantar kepada kepala kantor P dan K setempat beserta sebuah daftar tugas di mana para peneliti dapat melihat urutan-urutan tugas yang harus mereka laksanakan di tempat penelitian supaya penelitian dapat berjalan lancar dan tidak ada hal-hal penting yang mungkin dilupakan.

Di tiap-tiap tempat penelitian, peneliti lebih dahulu harus memilih Sekolah-sekolah dasar secara random, jadi tidak menerima saja SD yang di-sodorkan oleh kepala kantor P dan K setempat.

Di tiap-tiap SD sampel masing-masing peneliti mengisi sendiri instrumen observasi berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar.

Instrumen kuesioner diserahkan kepada guru kelas IV dan VI untuk diisi, sedangkan instrumen wawancara diisi oleh para peneliti waktu wawancara dengan kepala sekolah.

Selesai mengisi tiap-tiap instrumen diperiksa validitasnya.

Dengan demikian, terkumpul data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Data observasi untuk kelas IV (satu sekolah sudah diliburkan) untuk pelajaran BI	32
2. Data observasi kelas VI (satu sekolah sudah diliburkan) untuk pelajaran BI	32
3. Data observasi pelajaran NBI di kelas IV	32
4. Data observasi pelajaran NBI di kelas VI	32
5. Data kuesioner guru kelas IV (satu sekolah sudah diliburkan)	32
6. Data kuesioner guru kelas VI (satu sekolah sudah diliburkan)	32
7. Data wawancara (Kepala Sekolah kebetulan tidak libur)	33
	225

Jumlah data semua

Untuk dapat menganalisis, data ini ditabulasi dan direkapitulasi. Di dalam tabulasi ini sudah dipisahkan data SD desa, SD pinggiran, dan SD kota; pelajaran bahasa Indonesia (BI) dan pelajaran bukan bahasa Indonesia

(NBI) dan untuk memudahkan penjajagan kembali juga dicantumkan nama-nama peneliti (pangkal nama mereka).

Data yang telah ditabulasi dan direkapitulasi ini kemudian diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan apa yang hendak diteliti yaitu data yang ada hubungannya dengan frekuensi dan data yang ada hubungannya dengan intensitas pemakaian bahasa pengantar bahasa Indonesia secara lisan oleh guru dalam pelajaran BI dan NBI. Data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini dimasukkan ke dalam kelompok ketiga yaitu data sampingan.

Data frekuensi dan intensitas ditabulasi menurut (a) stratifikasi SD desa, SD pinggiran, dan SD kota; (b) kelas (untuk data observasi dan kuesioner); (c) pelajaran BI dan NBI (hanya untuk data observasi).

Demikian pula dengan data sampingan lainnya. Data sampingan ini dipakai sebagai penunjang hasil kesimpulan atau perbandingan-perbandingan unsur-unsur data frekuensi dan intensitas.

Unsur-unsur data yang telah diklasifikasi ini dicari persentasenya. Kemudian berturut-turut dibandingkan:

- 1) unsur-unsur frekuensi pemakaian BP-BI dalam hubungannya dengan lokasi SD sampel;
- 2) unsur-unsur intensitas pada pemakaian BP-BI dalam hubungannya dengan lokasi SD sampel;
- 3) prosentase frekuensi pemakaian BP-BI antara SD desa, SD pinggiran, dan SD kota; kemudian merumuskannya;
- 4) prosentase unsur-unsur frekuensi pemakaian BP-BI dalam hubungannya dengan lama waktu yang dipakai untuk BP-BI. Kemudian diuji kebenaran hipotesis bahwa semakin lama BP-BI dipakai semakin besar frekuensinya.
- 5) prosentase unsur-unsur intensitas pemakaian BP-BI antara SD desa, SD pinggiran, dan SD kota; kemudian diuji kebenaran hipotesis, semakin dekat dengan pusat kota, semakin tinggi intensitas pemakaian BP-BI.
- 6) prosentase unsur-unsur intensitas pemakaian BP-BI dalam hubungannya dengan lamanya waktu yang dipakai untuk BP-BI; kemudian diuji kebenaran hipotesis, semakin lama BP-BI dipakai semakin tinggi intensitasnya;
- 7) prosentase unsur-unsur frekuensi dan intensitas pemakaian BP-BI dalam hubungannya dengan pelajaran BI dan NBI.

Perbandingan-perbandingan frekuensi dan intensitas pemakaian BP-BI di atas disimpulkan dan ditafsirkan.

Hasil-hasil sampingan diklasifikasi pula menurut pola klasifikasi unsur-unsur frekuensi dan intensitas, kemudian dicari persentasenya. Unsur-unsur yang senada diolah lagi dan disimpulkan.

Dari ketiga data objektif di atas akhirnya dibuat kesimpulan umum. Hasil kesimpulan umum ini adalah sebagai berikut.

- 1) Frekuensi penggunaan BP-BI pada SD pinggiran dan SD kota cukup tinggi, berkisar sekitar 90% dan 83,1%.
- 2) Frekuensi pemakaian BP-BI di kelas VI secara umum meningkat daripada di kelas IV dengan perbandingan: 66,7% : 73,35%.
- 3) Intensitas pemakaian BP-BI makin ke pusat kota makin baik. Unsur bahasa daerah yang masuk di SD desa 83,2%; di SD pinggiran 60% dan di SD kota 35,7%.
- 4) Intensitas pemakaian BP-BI (dalam hal ini BI "murni") di kelas VI secara umum tampak meningkat daripada di kelas IV dengan perbandingan 66,75% : 73,4%.
- 5) Pemakaian BP-BI (BI "murni" dan bahasa Indonesia "campuran") pada pelajaran BI dan bukan bahasa Indonesia seimbang. Pelajaran bahasa Indonesia : pelajaran bukan bahasa Indonesia berbanding sebagai 98,3% : 98,4%.
- 6) Intensitas penggunaan BP-BI pada pelajaran bukan bahasa Indonesia nampak lebih baik daripada waktu pelajaran BI.
Perbandingan pemakaian BI "murni" sebagai berikut: pemakaian BP-BI untuk pelajaran BI : pelajaran NBI = 63,3% : 72,6%.
Pemakaian BI "campuran" untuk pelajaran BI : pelajaran NBI berbanding sebagai 35% : 25,8%.
Pemakaian bahasa daerah dalam pelajaran BI : pelajaran NBI berbanding sebagai 1,7% : 1,6%.
- 7) Di luar kelas bahasa Indonesia "murni" tak pernah dipakai sebagai alat komunikasi oleh murid.
- 8) BI "campuran" dipakai sebagai alat komunikasi antara murid pada SD kota, ini pun tidak terlalu banyak, lebih kurang 20,1%.
- 9) Alat komunikasi murid-guru di luar kelas:
Di SD desa mereka memakai 75% bahasa daerah; di SD pinggiran mereka memakai bahasa daerah kira-kira 40%; di SD kota mereka memakai BI "murni" 13,3%; BI "campuran" 66,6% dan bahasa daerah 20,1%.
- 10) Pemakaian bahasa Indonesia oleh murid kepada guru waktu pelajaran bahasa Indonesia di SD desa, SD pinggiran, dan SD kota berbanding sebagai berikut: 37,5% : 100% : 85,7%.
- 11) Pemakaian bahasa Indonesia oleh murid kepada guru waktu pelajaran bu-

kan bahasa Indonesia berbanding sebagai berikut.

SD desa : SD pinggiran : SD kota = 29,2% : 90% : 96,3%.

- 12) Bahasa daerah sebagai bahasa pengantar tidak lazim.
- 13) Baik untuk pelajaran bahasa Indonesia, maupun untuk pelajaran bukan bahasa Indonesia, sikap guru pada umumnya sangat positif, artinya mereka banyak mendorong murid untuk aktif menggunakan bahasa Indonesia.
- 14) Kesulitan yang dihadapi guru pada umumnya adalah kekurangan kosa kata murid-murid.
- 15) Keuntungan guru menggunakan BP-BI pada pelajaran BI : di sekolah-sekolah dasar ini anak dapat menerapkan pemakaian BI secara langsung, sedangkan pada pelajaran bukan bahasa Indonesia terutama di SD pinggiran dan SD kota pemakaian BP-BI memudahkan murid menerima pelajaran.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka ternyata bahwa guru menghadapi kesulitan dalam pemakaian BP-BI terutama karena murid-murid kekurangan kosa kata. Sebab itu disarankan supaya sekolah-sekolah dasar terutama SD desa dilengkapi dengan sarana kamus bahasa Indonesia untuk murid yang cukup.

Untuk memperbesar frekuensi dan mempertinggi intensitas pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar perlu kiranya majalah dinding dihidupkan dengan mendidik tenaga-tenaga untuk itu atau paling sedikit memberikan tuntunan kepada guru-guru tentang pemeliharaan majalah dinding itu.

Selain daripada itu dirasa perlu pula mengintensifkan penataran-penataran bahasa Indonesia untuk guru-guru SD terutama SD desa untuk menambah frekuensi dan intensitas pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD pada umumnya.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA MADURA DI MADURA

Oleh :

**Tim Peneliti Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia
FKSS – IKIP Surabaya**

13. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA MADURA DI MADURA

Penelitian tentang bahasa Madura memang cukup banyak jumlahnya tetapi penelitian itu tidak membicarakan persoalan kedudukan dan fungsi bahasa Madura.

Penelitian ini secara tidak berlebihan merupakan sebuah usaha pendahuluan atau penelitian perintis, sebagai akibat terasa kurangnya buku pembandingan dalam menggarap penelitian ini.

Untuk meneliti kedudukandan fungsi bahasa Madura kami membaginya dalam empat bab.

1. Pendahuluan

Bab ini berisi berbagai masalah yang melatarbelakangi persoalan sampai dengan tujuan dan hipotesis penelitian.

2. Tehnik dan Prosedur Penelitian:

Bab ini berisi tentang teknik penelitian, pengumpulan data, analisis fungsi, dan analisis kedudukan.

Uraian tentang penetapan populasi dan sampel desa, sampel keluarga, sampel guru, dan murid.

Instrumen termasuk pula pembicaraannya dalam bab ini.

3. Laporan Penelitian

Bab ini berisi klasifikasi keseluruhan data disertai analisisnya yang dikaitkan dengan berbagai variabel yang dianggap perlu. Variabel yang kami prioritaskan dalam kaitan ini ialah: tipe lingkungan pemakai bahasa, tingkat

pendidikan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Sedangkan kedudukan bahasa Madura kami batasi:

- a) Bahasa Madura sebagai bahasa ibu
- b) Bahasa Madura sebagai bahasa kebudayaan
- c) Bahasa Madura dalam domain keluarga
- d) Bahasa Madura dalam domain kedinasan
- e) Bahasa Madura dalam domain perdagangan
- f) Bahasa Madura dalam domain pendidikan formal.

4. Kesimpulan

Bab ini berisi ulasan serta kesimpulan penelitian. Saran secara sporadis kami masukkan ke 'dalamnya.

Tak kurang pentingnya kami lampirkan tabel, peta penelitian, daftar personalia, daftar petugas instrumen sebagai pelengkap.

Dalam menghadapi pengaruh perkembangan bahasa Indonesia yang secara deras memasuki pemakaian bahasa daerah maka ada pendapat mengenai kelestarian kehidupan sesuatu bahasa daerah.

Bahasa daerah yang tergolong pada BDB dalam menghadapi pengaruh bahasa Indonesia ini menunjukkan kecenderungan untuk bertahan, sedangkan BDK menampakkan gejala akan lenyap dan BDM ternyata mempunyai eksistensi yang justru mungkin dapat bertahan karena bahasa daerah ini akan menyatukan diri dengan bahasa Indonesia sebagai salah satu dialek bahasa Indonesia.

Sinyalemen seperti di atas memang banyak menunjukkan bukti-bukti. Bahasa Madura sebagai salah satu bahasa daerah yang telah memiliki tradisi sastra termasuk ke dalam BDB. Persoalannya, bagaimanakah kemungkinan kelestarian bahasa Madura ini bila dilihat dari data-data yang terkumpul dalam rangka penelitian kedudukan dan fungsi bahasa Madura di Madura ini. Dengan berpegang kepada data-data yang ada dan mengenyampingkan hal-hal yang ada di luar data penelitian ini maka akan dicoba melihat bagaimana kira-kira pengaruh bahasa Indonesia ini terhadap bahasa Madura di kemudian hari.

Bahwa pemakaian bahasa Indonesia telah mendesak pemakaian bahasa Madura, hal ini sudahlah pasti, karena saat ini bahasa Indonesia telah hadir dengan satu fungsi utama, sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa nasional yang melambangkan pula identitas bangsa dan juga kebanggaan nasional (Politik Bahasa Nasional). Dengan kedudukan bahasa Indonesia yang demikian itu, jelas bahwa terhadap bahasa Madura, juga terhadap bahasa-bahasa daerah yang lain, bahasa Indonesia mempunyai prestise yang

tinggi. Hingga kecenderungan beberapa pemakai bahasa daerah untuk mempergunakan bahasa Indonesia dalam beberapa keperluan merupakan sesuatu yang mudah dipahami. Sekalipun demikian akan ada pula fungsi-fungsi bahasa daerah yang tidak dapat diganti dengan pemakaian bahasa Indonesia.

Di dalam Seminar Politik Bahasa Nasional tanggal 25--28 Februari 1975, yang berhubungan dengan bahasa daerah disebutkan: Di dalam kedudukan sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makasar, dan Batak berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat-alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah.

Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah-daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

Dari kutipan di atas jelas pada bidang apa saja bahasa daerah itu menempati kedudukan dan fungsinya. Demikian pula halnya dengan bahasa Madura, sebagai salah satu bahasa daerah, akan memiliki fungsi dan kedudukan sebagai tersebut di atas walaupun mungkin tidak seluruhnya cocok. Di dalam penelitian mengenai *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Madura di Madura*, masalah ini akan dapat dilihat. Dalam penelitian ini yang diperiksa meliputi:

- (1) Kedudukan bahasa Madura sebagai bahasa ibu;
- (2) Kedudukan bahasa Madura sebagai bahasa kebudayaan;
- (3) Fungsi bahasa Madura di dalam domain keluarga;
- (4) Fungsi bahasa Madura di dalam domain kedinasan;
- (5) Fungsi bahasa Madura di dalam domain pendidikan formal, dan
- (6) Fungsi bahasa Madura di dalam domain perdagangan.

LAPORANG SINGKAT PENELITIAN

1. Bahasa Madura sebagai Bahasa Ibu

Dari 635 jawaban yang masuk ternyata 573 jawaban menyatakan bahwa bahasa Madura merupakan bahasa ibu. Bila jumlah ini dinyatakan dengan prosentase merupakan 89,74% dan jika dibulatkan menjadi 90%. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa ibu hanya diperoleh jawaban 14. Ini berarti sama dengan 2,32%. Sedangkan pemakaian bahasa campuran mencapai yang lebih tinggi yaitu 7,90%. Masalah bahasa campuran ini dalam pengertian pemakaiannya berseling-seling, masih perlu diberi kriteria yang

Dari urutan di atas kelihatan semakin formal sifat komunikasi yang ada, semakin cenderung orang untuk mempergunakan bahasa Indonesia. Hal ini jelas kelihatan pada domain kedinasan dan domain pendidikan formal. Pemakaian bahasa Madura tidak sampai mencapai angka 60%, malahan untuk pendidikan formal, berbeda jauh di bawah angka 50%, yaitu 29,41%. Ternyata di sini bahwa apa yang dikemukakan di dalam Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 yang dikutip di atas, ternyata betul.

Kalau di dalam domain kedinasan pemakaian BI mencapai angka 20,48%, sedangkan BC 14,26%, dalam domain pendidikan formal BI 48,65% dan BC 29,41%, maka sangat menarik perhatian apa yang terjadi dengan domain perdagangan. Dalam domain perdagangan ini ternyata bahwa BI hanya 1,22% sedangkan BC 18,51%. Kalau diperhatikan, maka dalam dua domain yang terdahulu pemakaian BI jauh berada di atas pemakaian BC, maka dalam domain perdagangan pemakaian BC berada jauh di atas prosentase yang diperoleh BI. Persoalannya ialah apakah yang tersirat di balik angka-angka itu? Kejadian ini haruslah dibaca bahwa di dalam domain kedinasan dan juga di dalam domain pendidikan formal pada prinsipnya akan dipergunakan BI. BC hanya dipergunakan apabila pemakaian BI dirasakan kurang kuat mendukung tujuan komunikatifnya. Sedangkan di dalam domain perdagangan, ada kecenderungan untuk mempergunakan BC, karena pemakaian BC di sini berfungsi santai, lebih akrab, dan lebih komunikatif apabila diperbandingkan dengan pemakaian BI. Pada umumnya bahasa-bahasa daerah itu memiliki fungsi kebahasaan yang sama. Situasi-situasi kebahasaan yang sifatnya tak resmi, tak dinas, tak literer, biasanya diantar dengan bahasa daerah (Supomo Pojosudarmo, 1976 : 3). Demikianlah maka pemakaian BM terbesar ditemukan dalam domain keluarga karena pergaulan dalam kekeluargaan bersifat tak resmi. Demikian pula dalam domain perdagangan. Sekalipun demikian, dalam domain perdagangan ini ada kemungkinan akan menginjak pada masalah resmi. Ketidakresmian yang ada sekarang karena responden diambil dari pasar atau dari warung kecil yang kebutuhannya masih terbatas pada kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil keseluruhan dari penelitian ini, maka tampak dengan jelas bahwa situasi bahasa Madura tampak menurun. Hal ini terutama disebabkan karena fungsinya banyak yang digantikan oleh BI. Hal ini ternyata jelas dalam pemakaian bahasa pada domain kedinasan dan domain pendidikan formal. Kenyataan yang lain lagi yang diperkuat dugaan ini karena ternyata bahwa di dalam domain keluarga pun sudah mulai mempergunakan BI. Pembicaraan dengan keluarga mengenai masalah yang bersangkutan-paut dengan keluarga, sudah ada yang mempergunakan BI. Kalau tidak

lebih tajam, yaitu sampai berapa banyak campuran itu. Perlu juga mendapat perhatian unsur-unsur yang mana yang banyak, bahasa Indonesia atau bahasa Madura? Istilah BC beberapa ahli bahasa belum sependapat.

Dengan kenyataan ini dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia kiranya belum dapat menembus atau melunturkan kedudukan bahasa Madura sebagai bahasa ibu. Di desa dan kota pun suku Madura tidak menunjukkan gejala perubahan bahasa ibunya, walaupun pada desa dan kota ada sinyalemen sementara merupakan desa yang dianggap peka terhadap pengaruh bahasa Indonesia.

2. Bahasa Madura sebagai Bahasa Kebudayaan

Terhadap penelitian kedudukan bahasa Madura sebagai bahasa kebudayaan ini pun bahasa Madura menunjukkan kedudukan yang mantap. Orang berceritera dan memainkan segala tari dan pertunjukkan daerah masih secara mantap menggunakan bahasa Madura. Dari 4 kabupaten penduduk cenderung menggunakan bahasa Madura, dalam hubungan ini mencapai angka 79,64%. Sedangkan penggunaan bahasa campuran yakni bahasa Madura dan Indonesia agak meningkat bila dibanding dengan dalam bahasa ibu. Bahasa campuran penggunaannya mencapai 17,55%.

Kesenian rakyat hampir tidak menggunakan bahasa Indonesia secara murni sebagai medianya. Namun, bahasa Indonesia dipakai secara setengah-setengah yang mungkin sebagai bumbu atau kadang-kadang bersifat terminologis. Kenyataan bahwa bahasa Madura lebih bersifat komunikatif dibanding dengan bahasa Indonesia dalam hubungan kebudayaan, khususnya kesenian. Di daerah itu secara murni bahasa Indonesia hampir tidak pernah digunakan dalam memainkan pertunjukkan rakyat, prosentase itu hanya mencapai 1,42% atau hampir tidak ada artinya. Ceritera rakyat yang menggunakan bahasa Indonesia frekuensinya hampir tidak berarti pula, yakni 4,25%. Hal ini paralel dengan asumsi dan hipotesis.

3. Fungsi Bahasa BM di dalam Domain-domain

Dari penelitian terhadap domain-domain yang ada, kelihatan bahwa pemakaian bahasa Madura tidak menunjukkan keseragaman. Di dalam domain keluarga ternyata bahwa pemakaian bahasa Madura menempati prosentase yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan prosentase pemakaian bahasa Madura pada domain-domain yang lain. Pemakaian bahasa Madura untuk domain keluarga mencapai angka 91,98%, kemudian disusul dengan domain perdagangan 80,23%, domain kedinasan 58,85%, dan terakhir domain pendidikan formal 29,41%.

BI, dipergunakan BC. Jumlah ini meliputi 1,85% BI dan 6,15% BC. Kalau BI dan BC dijumlahkan menjadi 8%.

Malahan di dalam penelitian mengenai kedudukan BM sebagai bahasa ibu, didapatkan angka-angka data sebagai berikut:

- a) BM digunakan sebagai bahasa ibu = 89,74%
- b) BI | digunakan sebagai bahasa ibu = 2,32%
- c) BC digunakan sebagai bahasa ibu = 7,94%.

Dari data-data ini, kedudukan BM sebagai bahasa ibu memang masih mantap, tetapi sekalipun demikian, telah menjadi kenyataan pula bahwa ada keluarga yang menjadikan BI sebagai bahasa ibu bagi anak-anaknya. Demikian pula dengan BC. Ada keluarga yang menggunakan BC sebagai bahasa ibu.

Bagi keluarga yang mempergunakan BI sebagai bahasa ibu, barangkali didorong oleh suatu pandangan hidup yang bersangkutan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa nasional, dan sekaligus sebagai bahasa negara. Hingga dengan prestise yang dimiliki oleh bahasa Indonesia ini, maka banyak keluarga yang tertarik untuk memperkenalkan BI bagi anak-anaknya sejak pertama kali mereka belajar mengenal bahasa. Tetapi kebalikannya, keluarga yang mulai dengan memperkenalkan putra-putranya dengan mempergunakan BC, rasanya didorong oleh satu pandangan hidup yang tidak lagi mau memperhatikan kehidupan bahasa daerah, dalam hal ini BM.

Dengan kenyataan ini, kiranya dapat dipersoalkan mengenai kelestarian BM untuk waktu yang relatif tidak lama. Sebagai bahasa daerah yang pemakaiannya sedang terdesak oleh pemakaian BI, maka dapat digambarkan bahwa pada saatnya BM hanya akan dipergunakan di dalam domain tertentu saja yang jumlahnya tidak banyak, sedangkan masalah yang dijadikan pokok persoalan pun akan sangat terbatas pula.

Hal tersebut di atas adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang lain lagi malahan justru BM dapat menjadi bahasa mati yang tidak dipergunakan orang. Hal ini, terutama apabila dilihat bahwa dalam variabel pendidikan ternyata menunjukkan bahwa pemakaian BM rata-rata berkurang dengan tingginya tingkat pendidikan. Atau dengan perkataan lain bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin kurang pemakaian BM. Oleh karena itu, pada hakekatnya pendidikan identik dengan kemajuan, demikian pula masyarakat Madura sama dengan masyarakat daerah lainnya, bergerak maju mengikuti perkembangan dunia internasional, maka pada akhirnya kemajuan ini akan banyak menentukan terhadap kelestarian BI.

PENUTUP

Dalam melaksanakan penelitian cukup banyak hambatan yang kami alami. Kiranya sebagai penutup tidak ada jeleknya bila hal itu kami paparkan di sini sebagai berikut.

- a. Sempitnya waktu yang diberikan untuk penelitian ini, secara praktis penelitian baru dapat dimulai bulan Oktober 1976 – berakhir pada medio 1977.
- b. Luasnya daerah penelitian BM.
- c. Sulitnya medan penelitian: alamnya, masyarakatnya.
- d. Kurangnya tenaga peneliti yang berpengalaman.
- c. Langkanya buku-buku sumber sebagai tumpuan teori dan perbandingan.

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DALAM
MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN**

Oleh :

Zainuddin Thaha

M. Ide Said D.M.

Ny. Hawang Hanafi

Aminuddin

14. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DALAM MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN

Salah satu masalah yang dapat dimunculkan dari hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah ialah masalah kedudukan dan fungsi kedua bahasa itu dalam masyarakat. Pemecahan masalah ini penting mengingat bahwa di samping bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa negara, di negara kita masih terdapat beratus bahasa daerah. Kekaburan yang terdapat di dalam pembedaan kedudukan dan fungsi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah akan merugikan perkembangan dan pembakuan kedua bahasa itu.

Hal lain yang perlu mendapat penjelasan ialah sikap masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Usaha penyebarluasan dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia yang bermutu perlu didasari dengan sikap positif terhadap bahasa tersebut. Penelitian tentang sikap masyarakat terhadap bahasanya belum banyak dilakukan. Memperoleh gambaran tentang sikap masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap bahasa Indonesia merupakan langkah baru dan sekaligus bertujuan mengetahui kemungkinan hambatan yang ditimbulkannya dalam proses peningkatan mutu dan penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia di daerah itu.

Selain itu, masalah yang merupakan titik tolak penelitian ini ialah masalah hubungan antara pemakaian bahasa Indonesia dengan pembicara, lawan bicara, dan situasi/waktu pembicaraan.

Sehubungan dengan beberapa masalah tersebut di atas, maka ada tiga hal yang menjadi tujuan penelitian. Pertama, penelitian bertujuan mengumpulkan data yang menyangkut kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam masyarakat di Sulawesi Selatan. Data ini berguna untuk menentukan perbedaan antara kedudukan dan fungsi bahasa lain, yakni bahasa daerah dan bahasa asing. Adanya gambaran yang jelas yang membedakan antara

kedudukan dan fungsi ketiga bahasa tadi memperlancar usaha menentukan kebijaksanaan dalam mengelola dan mengarahkan perkembangan bahasa-bahasa di Indonesia.

Kedua, penelitian bertujuan pula mengumpulkan data yang menyangkut sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia merupakan syarat mutlak dalam menyukkseskan usaha pembakuan dan pengembangan bahasa Indoensia. Rencana pemerintah untuk mengadakan penyuluhan bahasa Indonesia yang meluas sangat baik, apalagi jika penyuluhan itu dapat menyentuh pula segi-segi yang immateril, terutama yang menyangkut hal-hal yang bertujuan menumbuhkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Sebelum itu, tentu perlu diketahui bagaimana sebenarnya sikap masyarakat kita pada saat sekarang, terutama sikap masyarakat di **Sulawesi Selatan**.

Ketiga, penelitian bertujuan menerangkan hal-hal yang menyebabkan dipergunakannya lebih dari satu bahasa, yaitu:

- 1) mengetahui kapan/bilamana, dalam situasi apa, di mana, oleh siapa, dan dengan siapa bahasa Indonesia digunakan;
- 2) mengetahui kapan/bilamana, dalam situasi apa, di mana, oleh siapa, dan dengan siapa bahasa daerah digunakan,
- 3) mengetahui/mencari kapan/bilamana, dalam situasi apa bahasa asing digunakan,

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yang mendasarkan diri pada penelitian lapangan, yang berorientasi pada masalah dan yang lebih bersifat survei. Metode yang dipilih ialah metode ekstensif. sedangkan teknik penelitian dilakukan dengan :

- 1) kuesioner tersusun,
- 2) wawancara yang tertuntun dan tidak tertuntun.

Di samping itu, digunakan juga teknik observasi yang tidak intensif, guna melengkapi metode ekstensif yang digunakan tadi.

Populasi penelitian meliputi:

- a. pejabat-pejabat pemerintah,
- b. pemuka-pemuka masyarakat,
- c. pemuka-pemuka agama dan adat,
- d. sastrawan dan wartawan,
- e. siswa dan mahasiswa,
- f. pedagang dan pengusaha, dan
- g. petani, nelayan, dan buruh yang semuanya ini disebut dengan istilah kepala rumah tangga.

Sampel penelitian ditetapkan menurut daerah, yaitu :

- 1) daerah kotamadya.
- 2) daerah kabupaten.

Di samping itu, sampel tadi ditetapkan pula berdasarkan stratifikasinya, yaitu:

- 1) kota,
- 2) pinggir kota, dan
- 3) desa.

Kotamadya Ujung Pandang dan Pare-Pare merupakan daerah yang mewakili kota. Selanjutnya, Soppeng adalah daerah yang mewakili pinggir kota. Kemudian, Tanah Toraja, Polewali, dan Bantaeng dipilih sebagai daerah yang mewakili desa. Tabel berikut memperlihatkan daerah sampel tersebut di atas.

TABEL
DAERAH SAMPEL

Daerah Stratifikasi	Kotamadya	Kabupaten
Kota	Ujung Pandang Pare-Pare	—
Pinggir kota	—	—
Desa	—	Tanah Toraja Polewali Bantaeng

Instrumen penelitian yang digunakan ialah sebuah petunjuk observasi, sebuah wawancara, dan lima buah daftar kuesioner. Kelima daftar kuesioner itu adalah sebagai berikut :

- 1) untuk guru/dosen
- 2) untuk pelajar/mahasiswa,
- 3) untuk pedagang/pengusaha,
- 4) untuk pegawai/ABRI, dan
- 5) untuk kepala rumah tangga.

Dalam setiap macam daftar kuesioner itu disusun dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Pertanyaan umum ialah pertanyaan yang diajukan kepada semua golongan responden, sedangkan pertanyaan khusus ialah pertanyaan yang diajukan kepada satu atau dua golongan responden saja.

Kuesioner yang disebarakan berjumlah 1.000 buah. Distribusi dan perimbangannya untuk tiap-tiap macam dan tiap-tiap daerah dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL
DISTRIBUSI KUESIONER

Lokasi Responden	KMUP	Pare-Pare	Tana Toraja	Soppeng	Polewali	Bantaeng	F
Guru/Dosen	55	20	35	30	40	20	200
Pelajar/Mahasiswa	55	20	35	40	30	20	200
Pedagang/Pengusaha	55	30	20	40	20	35	200
Pegawai/ABRI	55	20	35	30	40	20	200
Kepala rumah tangga	55	20	35	30	40	20	200
Jumlah	275	110	160	170	170	115	1000

Waktu menyebarkan kuesioner tadi, para petugas lapangan senantiasa memperhatikan petunjuk umum yang telah disusun lebih dahulu oleh tim

peneliti. Dari tiap-tiap kotamadya/kabupaten dipilih tiga daerah responden, yaitu:

- a) daerah responden I (DR I),
- b) daerah responden II (DR II),
- c) daerah responden III (DR III).

Dalam memilih tiga daerah responden tadi diusahakan agar masing-masing tempat berasal dari tiga kecamatan yang berbeda-beda pula. Prinsip-prinsip pemilihan adalah sebagai berikut:

a) Daerah Responden I

Untuk tempat ini, petugas lapangan memilihnya dalam kecamatan yang merupakan pusat kotamadya/kabupaten.

b) Daerah Responden II

Penetapan daerah responden ini ialah memilih satu tempat yang berada di kecamatan yang berbeda dengan kecamatan yang ditempati oleh daerah responden I. Penentuan tempat tadi didasarkan pada arah mata angin Utara. Artinya, tempat ini letaknya sebelah utara responden I. Penentuan arah mata angin Utara didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah Sulawesi Selatan memanjang dari Selatan ke Utara dan daerah tersebut hampir semua sisinya dikelilingi dengan atau berbatasan dengan laut kecuali sebelah Utaranya.

Jarak daerah responden II dari daerah responden I tidak boleh kurang dari 5 km. Kalau seandainya tempat yang ditunjuk tadi terdiri dari laut atau sudah berbatasan/berada di luar daerah kotamadya/kabupaten yang bersangkutan, maka dipilih tempat lain yang terletak pada arah mata angin yang berdekatan dengan Utara, yakni Barat atau Timur. Perhitungan jarak serta arah tadi tetap didasarkan pada daerah responden I.

c) Daerah Responden III

Setelah daerah responden II ditetapkan maka dipilih daerah responden III. Caranya ialah memilih tempat yang berada dalam sebuah kecamatan yang berbeda, baik dengan kecamatan yang ditempati daerah responden I maupun dengan kecamatan yang ditempati daerah responden II.

Jarak daerah responden III dari daerah responden II tidak boleh kurang dari 15 km. Letaknya didasarkan pada arah mata angin yang bertentangan dengan mata angin yang dipakai dasar pada saat menetapkan daerah responden II. Kalau dipilih Utara pada waktu menetapkan daerah responden II, maka pada saat memilih daerah responden III dipakai Selatan.

Dengan perkataan lain, penentuan jarak dan arah mata angin tadi didasarkan pada daerah responden II. Kalau tempat yang ditunjuk berdasarkan perhitungan dari laut, maka dipilih tempat lain dengan perhitungan seperti yang dilakukan semula, yaitu mengganti arah mata angin lain yang berdekatan dengan arah mata angin yang ditetapkan semula.

Di samping petunjuk umum yang diuraikan di atas, digunakan pula petunjuk khusus yang dipakai pada saat memilih masing-masing kelompok responden.

Waktu menyebarkan kuesioner untuk kepala rumah tangga, petugas memperhatikan segi-segi:

- (1) letaknya yang berdekatan dengan tanda-tanda pengenal tempat tertentu (*landmark*), misalnya mesjid, sekolah, pasar, lapangan, bioskop, dan lain-lain;
- (2) bentuk rumahnya; yaitu rumah darurat, semi permanen, dan permanen atau rumah bambu, kayu dan batu.

Bagi golongan pegawai/ABRI, petugas senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) departemen tempat bekerja,
- (2) instansi negeri dan swasta,
- (3) jabatan dan pangkat yang diduduki.

Responden pedagang dan pengusaha dipilih berdasarkan:

- (1) perusahaan besar dan kecil,
- (2) perusahaan pribumi dan nonpribumi.

Responden guru/dosen dipilih berdasarkan:

- (1) tingkat sekolah (SD, SLA, dan PT),
- (2) jenis sekolah (negeri dan swasta),
- (3) bidang ilmu yang diasuhnya.

Responden pelajar/mahasiswa dipilih berdasarkan:

- (1) tingkat atau kelas,
- (2) jenis sekolah (negeri dan swasta),
- (3) bidang ilmu yang dituntutnya.

Disamping data yang terkumpul melalui daftar keusioner, terdapat juga data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara.

Wawancara diberikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- (1) walikota/bupati,

- (2) ketua/anggota DPR kotamadya/kabupaten,
- (3) ketua pengadilan/hakim,
- (4) kepala jawatan penerangan,
- (5) kepala kantor departemen P dan K kabupaten dan kecamatan,
- (6) kepala kantor pos di kabupaten
- (7) kepala sekolah dan guru,
- (8) beberapa pelajar/mahasiswa dan kepala rumah tangga.

Observasi dilakukan terhadap pemakaian bahasa Indonesia ditempat-tempat umum seperti pasar, toko/warung, apotek, mesjid, restoran; dalam acara-acara resmi; acara keluarga; pembicaraan di telepon dan sebagainya.

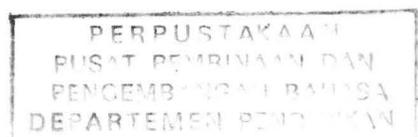
Kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa negara dalam masyarakat di Sulawesi Selatan telah cukup dihayati dan dimanfaatkan sepanjang terdapatnya syarat dasar yang harus dimiliki oleh anggota masyarakat tersebut, yakni penguasaan bahasa Indonesia.

Penghargaan, aspirasi, dan tekad yang terwujud di atas kertas atau hasil perumusan seminar dan ketentuan dalam perundang-undangan yang diberikan kepada bahasa Indonesia bukan hanya terbatas pada itu saja melainkan telah difungsikan (telah diamalkan dan telah disadari sebagai suatu kebutuhan) oleh masyarakat di Sulawesi Selatan sepanjang menyangkut situasi tertentu.

Dalam hal sikap masyarakat ternyata bahwa hampir semua golongan masyarakat memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Cuma satu hal yang menarik perhatian untuk dipersoalkan lebih lanjut ialah menyangkut masyarakat pelajar/mahasiswa yang mempunyai sikap agak kurang positif bila dibandingkan dengan golongan masyarakat lainnya. Hal ini tentu dapat diselidiki latar belakangnya, baik yang bersumber pada latar belakang kebahasaan maupun yang berhulu pada latar belakang luar kebahasaan.

Bahasa Indonesia dalam masyarakat di Sulawesi Selatan bukan merupakan suatu bahasa yang didukung oleh kelompok masyarakat tertentu yang memakai bahasa itu sebagai bahasa ibu (pertama) seperti halnya dengan anggota kelompok bahasa lainnya (Bugis, Makassar, Mandar, Sa'dang, dan Massenrempulu). Bagi kebanyakan anggota masyarakat di Sulawesi Selatan, bahasa Indonesia dikenal atau dikuasai setelah mereka terlebih dahulu menguasai salah satu daripada anggota kelompok bahasa daerah yang ada, sehingga bahasa Indonesia baginya kurang lebih sebagai bahasa kedua saja.



21 40

URUTAN			
91	-	8451	

300